

**UPAYAPENINGKATANLAYANAN
PENDIDIKANSEKOLAHINKLUSIFTERHADAP
ANAKBERKEBUTUHANKHUSUS(ABK)
DI SEKOLAHDASAR NEGERI SEKAR II
KECAMATANDONOROJO
KABUPATENPACITAN**

TESIS



Diajukan oleh
SUTARTI
NIM 161403328

Kepada

**MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHAYOGJAKARTA
2018**

**UPAYAPENINGKATANLAYANAN
PENDIDIKANSEKOLAHINKLUSIFTERHADAP
ANAKBERKEBUTUHANKHUSUS(ABK)
DI SEKOLAH DASAR NEGERI SEKAR
IIKECAMATANDONOROJO
KABUPATEN PACITAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh
SUTARTI
161403328

**Kepada
MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHAYOGJAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYAPENINGKATANLAYANAN
PENDIDIKANSEKOLAHINKLUSIFTERHADAP
ANAKBERKEBUTUHANKHUSUS(ABK)
DI SEKOLAH DASAR NEGERI SEKAR II
KECAMATAN DONOROJO
KABUPATEN PACITAN

Oleh

SUTARTI

NIM : 161403328

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji, jurusan Magister Manajemen
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta dan telah disetujui pada :

Tanggal

Tim Penguji:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

DR. Wahyu Widayat, M.Ec.

Drs Achmad Tjahjono, MM.A

Dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
Yogyakarta,

Mengetahui
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGJAKARTA
DIREKTUR

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph. D

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutarti
NIM : 161403328
Angkatan : 16.IF
Kebidangan : Pendidikan
Judul Tesis : Upaya Peningkatan Layanan Pendidikan Sekolah Inklusif Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Pebruari 2018

SUTARTI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmatnya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Penulisan tesis ini sudah pasti tidak dapat terselesaikan jika hanya mengandalkan kemampuan pribadi semata, melainkan adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu di sini disampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak DR Wahyu Widayat, M.Ec selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membagi ilmunya dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Drs. Achmad Tjahjono, M.M, Ak selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan berbagi ilmu sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Ibu dosen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmunya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Muhammad Subhan M.M, selaku Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta atas kebijakan dan motivasinya demi terselesainya penulisan tesis ini.
5. Bapak Drs John Suprihanto, MIM,PhD, selaku Direktur Program Magister Manajemen atas segala kebijakan, perhatian dan dorongan demi terselesainya penulisan tesis ini.
6. Suami tersayang yang dengan sepenuh hati memberikan dorongan demi terselesainya penulisan tesis ini.
7. Ananda tercinta yang telah memberi motivasi dengan sepenuh hati guna penyelesaian penulisan tesis ini.

8. Semua teman-teman guru Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, yang telah memberi motivasi demi terselesainya penulisan tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungannya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan

Karya ini tentunya jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan demi perbaikan penelitian ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk karya-karya berikutnya.

Yogyakarta, Pebruari 2018

SUTARTI

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ARTI SIMBOL DAN SINGKATAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
INTISARI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Pertanyaan Penelitian.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pendidikan Inklusif dan layanan pendidikan.....	9
B. Hakikat Layanan Pendidikan.....	18
C. Tujuan Pendidikan Inklusif.....	24
D. Fungsi Pendidikan Inklusif.....	28
E. Manfaat Pendidikan Inklusif.....	29
F. Landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif.....	32
G. Mengubah Paradigma dan Membangun Komitmen dalam Penyelenggaraan Pendidikan inklusif.....	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan / disain Penelitian	70
B. Definisi Operasional.....	71
C. Populasi dan Sampel.....	72
D. Data Dan Sumber.....	73
E. Instrumen Penelitian	74
F. Pengumpulan Data.....	76
G. Metoda Analisis Data	77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	80
B. Pembahasan.....	84

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	96
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

1. Indikator keberhasilan pendidikan inklusif..... 54

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

1. Bagan Tahapan Menuju Masyarakat Inklusif	47
2. Bagan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah.....	59
3. Bagan Paradigma dan membangun komitmen dalam implementasi Pendidikan Inklusif.....	66
4. Bagan Kerangka Penelitian.....	67

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

1. Cuplikan hasil wawancara dengan siswa berkebutuhan khusus.
2. Cuplikan hasil wawancara dengan guru kelas.
3. Lembar observasi guru kelas.
4. Foto–foto kegiatan.
5. Hasil ulangan semester I Th 2017 / 2018.
6. Hasil try out kelas VI Th 2017 / 2018.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ARTI SIMBUL DAN SINGKATAN

1. ABK : Anak Berkebutuhan Khusus.
2. GPK : Guru Pembimbing Khusus.
3. SLB : Sekolah Luar Biasa.
4. HAM : Hak Azazi Manusia.
5. SISDIKNAS : Sistem Pendidikan Nasional.
6. PERMENDIKNAS : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
7. LIRP : Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

It is not all institution education will accept the student who need special needs, to get knowledge in their school it is. Only the inclusive schools that accept the students who need special needs to study in their schools with their friends.

The inclusive schools give education serving with many kinds characters and philosophy that appreciate differences of the students. These schools serve the students who have special needs suitable with their needs without differing, where they come from, different ethnic, social condition, economy, social politic, family, language, geography, gender religion and condition of their physical mental intellectual emotion and attitude all of the students have rights to get education.

The elementary school of Sekar two, Donorojo District, Pacitan Regency as the inclusive school has given education serving to the students who have special need. This year the elementary of Sekar two has twelve students, who need special treatment. They are consist of nine boys and three girls. Kinds of students needs are eleven slow in studying and one difficult in studying. The elementary school of Sekar two tries hard to increase education serving to the students who need special treatment by many ways : to socialize to the societies about inclusive education, trying hard to complete the facilities inclusive school, to facilitate the teachers to follow training center, workshop, seminar about inclusive education, to complete the facilities of inclusive school, and this school does not discriminate.

INTISARI

Tidak semua lembaga sekolah mau menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk menuntut ilmu di sekolahnya. Hanya sekolah inklusif yang mau menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk belajar di sekolah tersebut bersama-sama dengan teman sebayanya.

Sekolah inklusif memberikan layanan pendidikan dalam keragaman dan falsafahnya yaitu menghargai perbedaan semua peserta didik. Layanan yang diberikan sekolah kepada siswa berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kebutuhannya, tanpa membedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, sosial, politik, keluarga, bahasa, geografis, jenis kelamin, agama dan perbedaan kondisi fisik, mental/intelektual, sosial, emosional dan perilaku. Semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Tahun ini SDN Sekar II memiliki siswa berkebutuhan khusus sejumlah 12 siswa, yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Adapun ketunaan yang mereka sandang adalah sebelas siswa mengalami lamban belajar, dan satu siswa berkesulitan belajar.

Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sebagai sekolah inklusif telah memberikan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhankhusus. Namun layanan tersebut belum optimal, dikarenakan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusif. Sebagian masyarakat belum paham tentang pendidikan inklusif. Mereka belum tahu bahwa sekolah reguler bisa menerima siswa berkebutuhan khusus. Mereka beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus harus bersekolah di sekolah luar biasa. 2) Tidak adanya guru pembimbing khusus. Sampai saat ini SDN Sekar II sebagai sekolah Inklusif belum memiliki guru pembimbing khusus. 3) Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan guru tentang pendidikan inklusif. Pengetahuan dan keterampilan gur-guru tentang pendidikan inlusif masih sangat terbatas. 4) Kurang adanya sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus. Sarana dan Prasarana untuk anak berkebutuhan khusus, guna menyalurkan bakat dan potensi yang dimiliki masih

belum cukup. 5) Masih adanya anggapan bahwa anak berkebutuhan khusus sekolahnya di sekolah luar biasa. Masih banyak masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah reguler. Mereka masih beranggapan bahwa tempat sekolah anak berkebutuhan khusus itu di sekolah luar biasa.

. SDN Sekar II berupaya untuk meningkatkan layanan pendidikan terhadap siswa berkebutuhan khusus melalui berbagai cara yaitu: 1) Mengadakan sosialisasikepadamasyarakat tentang pendidikan inklusif. Di setiap awal tahun pelajaran sekolah mengumpulkan wali murid untuk memberikan sosialisasi tentang pendidikan inklusif. 2) Mengupayakan pengadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Sekolah telah berupaya untuk pengadaan guru pembimbing khusus, dengan cara mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. 3) Memfasilitasi guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui: pendidikan dan pelatihan, workshop, dan seminardan KKG pendidikan inklusif, baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten. 4) Pengadaan sarana dan prasarana untuk siswa berkebutuhan khusus.Sekolah berupaya untuk pengadaan sarana dan prasarana peralatan olah raga, guna menunjang penyaluran bakat dan potensi siswa berkebutuhan khusus di bidang olah Raga, dan berupaya pengadaan peralatan pertukangan dan kerajinan, untukpenyaluran keterampilan mereka. 5) Sekolah tidak diskriminatif. SDN Sekar II menerima dan mendidik para siswa berkebutuhan khusus, sama seperti anak normal lainnya tanpa ada perbedaan. Mereka memperoleh hak yang sama dalam pendidikan.

Kata Kunci : Sekolah Inklusif.

Upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai keadaan, baik fisik maupun psikisnya. Ada yang diciptakan dengan anggota tubuh yang lengkap dan psikis yang sempurna. Ada yang anggota tubuhnya lengkap, namun psikisnya terganggu, ada yang psikisnya bagus, tetapi anggota tubuhnya kurang lengkap dan ada pula yang anggota tubuhnya kurang lengkap, juga psikisnya kurang sempurna.

Ada yang dikaruniai panca indera lengkap, namun ada pula yang salah satu panca inderanya tidak dapat berfungsi. Misalnya; ada yang tidak dapat melihat (tuna netra), ada yang alat pendengarannya terganggu (tuna rungu), ada yang tidak dapat berbicara (tuna wicara), ada yang cacat anggota tubuh (tuna daksa), ada juga yang tuna grahita dan lamban belajar. Anak yang mengalami perbedaan dan kekurangan ini disebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak-anak tersebut membutuhkan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Anak-anak tersebut juga butuh pendidikan dan belajar sama seperti anak-anak yang lain yang tidak memiliki perbedaan atau kelainan.

Namun tidak semua lembaga sekolah mau menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ini belajar di sekolahnya. Bahkan tidak sedikit sekolah yang menolak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan berbagai macam alasan, ada yang beralasan tidak punya Guru Pembimbing Khusus

(GPK), ada yang alasannya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat menurunkan popularitas sekolah tersebut. Bahkan ada pula yang menolak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan alasan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) akan mengganggu prestasi siswa yang lain dan juga peringkat kelulusan dari sekolah tersebut.

Adanya perubahan paradigma pendidikan yang memiliki trend kapasitas, juga kenyataan selama ini bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), seperti tersingkir, seolah-olah sampah yang harus dibersihkan dan dibuang agar tidak mengotori lingkungan. Sedikit beruntung bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bisa menikmati belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB), selebihnya tidak bisa belajar di sekolah, dikarenakan berbagai faktor, antara lain faktor geografis, ekonomi dan sosial.

Selama ini masih banyak orang beranggapan bahwa tamatan Sekolah Luar Biasa (SLB) tetap dipandang sebagai tamatan yang *inkomtensi*, *skiptis* dan *sterotipe*. Pada hakekatnya memilah-milah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan non Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam pendidikan bukanlah kearifan, melainkan kenafian yang mengarah ke diskriminasi dan pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM).

Oleh sebab itu Pemerintah berupaya untuk menghilangkan diskriminasi tersebut dengan menyelenggarakan sekolah inklusif. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap

murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil.

Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai dengan sistem penilaiannya.

Sebagaimana diketahui berbagai catatan berkenaan dengan siswa berkebutuhan khusus justru memperlihatkan profil memprihatinkan anak-anak bangsa. Dari periode ke periode mereka mengalami peningkatan jumlah populasinya. Sebagian terbesarnya lahir dalam keluarga kelas menengah bawah, serta tinggal di kawasan pedesaan atau pinggiran atau pinggiran wilayah-wilayah urban. Keterbatasan mereka mendapatkan pendidikan bertali temali dengan banyak aspek. Bukan saja tak memiliki ketercukupan biaya demi mengenyam pendidikan secara memadai. Tak kalah tragisnya, mereka terbentur kesulitan transportasi, untuk bisa mencapai ibukota kabupaten. Logis jika kemudian sekolah-sekolah umum turut serta memikul tanggung jawab menerima kehadiran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam totalitas proses pendidikan.

Pendidikan inklusif dimaksud sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belajar bersama anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Di sisi

lain dari pendidikan inklusif ialah mengubah makna keberadaan pendidikan umum. Dalam perspektif para penyandang cacat, sekolah-sekolah umum telah sejak lama dirasakan sebagai seonggok kejumawaan, lantaran hanya memberi tempat bagi siswa normal. Dengan demikian berarti sekolah-sekolah umum berubah menjadi eksklusif manakala disimak berlandaskan perspektif penyandang cacat. Mungkin karena alasan ini para pejabat tinggi di kementerian Pendidikan Nasional lalu tampil dengan nada positif saat berbicara tentang pendidikan inklusif. Mereka bahkan memaknai kehadiran pendidikan inklusif sejalan dengan tujuan sistem pendidikan nasional.

Apa yang kemudian penting digaris bawah dengan kian terkikisnya pandangan negatif terhadap integrasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ke dalam pendidikan umum. Sebagai konsekuensinya, dibutuhkan rancangan pendidikan inklusif. Pada satu sisi, kesiapan infra struktur dan ketersediaan guru mutlak mempertimbangkan keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pada sisi lain, sudah saatnya proses pendidikan mempertimbangkan *inner scientific*. Sehingga, totalitas sistem pendidikan yang berjalan fokus pada potensi individu siswa. Inilah pendidikan inklusif dalam maknanya yang hakiki.

Beberapa alasan penerapan pendidikan inklusif antara lain semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak didiskriminasikan dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pembelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.

Di sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, kabupaten Pacitan, sebagai sekolah inklusif telah memberikan layanan pendidikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), namun layanan yang diberikan belum dapat optimal, dikarenakan berbagai faktor yang menjadi kendalanya, di antaranya :

1. Pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif.
2. Tidak adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK) di Sekolah Dasar Negeri Sekar II sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
3. Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan bagi guru Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dalam memberikan layanan pendidikan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
4. Sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesabel bagi disabilitas.
5. Masih adanya anggapan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) seharusnya menuntut ilmunya di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Tahun ini Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo , Kabupaten Pacitan, memiliki 12 siswa yang termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Adapun jenis ketunaan yang disandang Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebut adalah 11 anak mengalami lamban belajar, dan 1 anak menyandang berkesulitan belajar.

Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan sebagai sekolah Inklusif, berupaya untuk meningkatkan layanan pendidikan terhadap Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK).Layanan pendidikan ini diharapkan dapat memberikan bekal untuk masa depan bagi Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

B. Perumusan Masalah.

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut: Layanan Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kurang optimal.

C. Pembatasan Masalah.

Agar penelitian ini dapat memperoleh hasil yang optimal pada permasalahan yang diteliti, maka dibatasi pada bidang: Layanan Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Pembatasan masalah dilakukan karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga.

D. Pertanyaan penelitian.

Dalam tesis ini, pertanyaan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah: Mengapa layanan pendidikan yang diberikan oleh Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kurang optimal ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :
Upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

F. Manfaat penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan, manfaat yang diperoleh adalah :

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmu pengetahuan dan referensi tambahan bagi para praktisi yang akan mengadakan penelitian layanan pendidikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

2. Manfaat Praktis.

a. Manfaat bagi OrangTua.

Penelitian ini memberikan manfaat bagi orang tua yaitu dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran, terutama bagi orang tua yang mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), terkait dengan adanya Sekolah Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sehingga mereka tidak akan kerepotan dan kebingungan untuk memasukkan anaknya ke sekolah agar dapat belajar seperti teman-teman sebayanya.

b. Manfaat bagi sekolah.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi sekolah yaitu dengan diadakannya penelitian ini maka bisa memberikan informasi yang sangat penting bagi masyarakat di lingkup kecamatan Donorojo dan sekitarnya, bahwa Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sebagai sekolah inklusif, dapat menerima dan memberikan layanan pendidikan kepada Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berada di wilayah Kecamatan Donorojo dan sekitarnya.

c. Manfaat bagi Pengembang ilmu dan teknologi :

- 1) Sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.
- 2) Sebagai dokumen untuk pengembangan pendidikan.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan pemerintah pada sekolah inklusif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pendidikan Inklusif dan layanan pendidikan.

Inklusif mempunyai pengertian yang beragam. Stainback dan Stainback (1990) mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Lebih dari itu sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individunya dapat terpenuhi.

Staub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.

Sapo Shevin (O Neil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama dengan teman seusianya. Oleh karena itu ditekankan adanya restrukturisasi sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak. Artinya dalam pendidikan inklusif

tersedia sumber belajar yang kaya dan mendapat dukungan dari semua pihak, meliputi para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Freiberg, 1995). Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.

Pendidikan inklusif dalam beberapa tahun ini telah menjadi isu yang sangat menarik dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan pendidikan inklusif memberikan perhatian pada pengaturan para siswa yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan pendidikan pada sekolah-sekolah umum atau reguler.

Widiati (2014) : Pendidikan inklusif adalah Sistem Pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Sistem pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa membedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik, mental/ intelektual sosial, emosional, dan perilaku.

Berdasarkan Undang –Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan dan hak yang sama dengan peserta didik pada umumnya dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya dan hambatan/ gangguan/ kelainan yang dimiliki.

Lahirnya paradigma pendidikan sarat dengan muatan kemanusiaan dan penegakan hak-hak asasi manusia. Inti (core) dalam paradigma pendidikan inklusif adalah sistem pemberian layanan pendidikan dalam keragaman, dan falsafahnya yaitu menghargai perbedaan semua peserta didik. Pendidikan inklusif adalah sebuah paradigma pendidikan yang humanis. Pendidikan inklusif adalah sebuah falsafah pendidikan yang dapat mengakomodasi semua peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.

Pada tataran operasional layanannya menggeser pola segregasi menuju pola inklusif. Hal ini mengandung konsekuensi logis terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan sekolah kejuruan, antara lain sekolah harus lebih terbuka, ramah terhadap peserta didik, dan tidak diskriminatif.

Berbicara sekolah inklusif adalah berbicara semua anak. Anak adalah sebagai pribadi yang unik, yang memiliki perbedaan, perlu tumbuh kembang dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Untuk mengakomodasi keberagaman

karakteristik anak, maka perlu adanya sistem pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Kustawan (2013): Pendidikan inklusif adalah sebuah konsep yang menjangkau semua individu tanpa kecuali. Atau dengan kata lain pendidikan inklusif adalah: “Sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu“. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai perbedaan peserta didik, dan memberikan layanan kepada setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak diskriminatif. Pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa, dan sebagainya. Semua peserta didik belajar bersama-sama, baik di kelas/ sekolah formal maupun non formal yang berada di tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik.

Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat istimewa, Pasal 1 bahwa: Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pengertian pendidikan inklusif yang masih senada dengan Permendiknas di atas yaitu sesuai dengan Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru Pendidikan khusus, bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan, dengan cara menyediakan sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik. Dalam pelaksanaannya pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak berkebutuhan khusus dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Bergabungnya anak-anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar bersama anak-anak normal dapat dilakukan dengan 3 model, yaitu *mainstream*, *integratif*, dan *inklusif*. *Mainstream* adalah sistem pendidikan yang menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus disekolah-sekolah umum, mengikuti kurikulum akademis yang berlaku, dan guru juga tidak harus melakukan adaptasi kurikulum. *Mainstream* kebanyakan diselenggarakan untuk anak-anak yang

sakit yang tidak berdampak pada kemampuan kognitif, seperti epilepsi, asma, dan anak-anak dengan kecacatan sensori (fasilitas peralatan, seperti alat bantu dan buku-buku Braille) dan anak – anak tuna daksa. *Integrasi* berarti menempatkan siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler. Di kelas tersebut anak-anak berkebutuhan khusus hanya mengikuti pelajaran-pelajaran yang dapat mereka ikuti dari gurunya. Adapun untuk mata pelajaran akademis lainnya, anak-anak berkebutuhan khusus menerima pelajaran pengganti di kelas berbeda yang terpisah dari teman-teman mereka. Penempatan terintegrasi tidak sama dengan integrasi pengajaran dan integrasi sosial, karena integrasi tergantung pada dukungan yang diberikan sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inklusif adalah sebuah filosofi pendidikan dan sosial. Dalam inklusif semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan, apapun perbedaan mereka. Pendidikan inklusif berarti bahwa semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, suku, latar belakang, budaya atau bahasa dan agama, menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memperhatikan bagaimana mentransformasikan sistem pendidikan, sehingga dapat merespon keanekaragaman siswa, yang memungkinkan guru dan siswa merasa nyaman dengan keanekaragaman tersebut, serta melihatnya lebih sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dari pada melihatnya sebagai suatu problem. Inklusif adalah cara berpikir dan bertindak yang memungkinkan setiap individu merasakan penerimaan dan penghargaan.

Prinsip inklusif mendorong setiap unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran mengusahakan lingkungan sekolah yang ramah terhadap pembelajaran dan semua siswa dapat belajar secara efektif secara bersama-sama. Dengan demikian, tidak ada siswa yang akan ditolak atau dikeluarkan dari sekolahnya disebabkan tidak mampu memenuhi standar akademis yang ditetapkan. Walaupun pada sisi yang lain beberapa orang tua merasa khawatir kalau anak-anak mereka yang memiliki kecacatan akan menjadi beban ejekan atau diganggu oleh orang-orang di sekitarnya.

Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2007): Sekolah inklusif menerima semua anak tanpa memandang kemampuan, kecacatan, gender, status HIV dan kesehatannya maupun latar belakang sosial, ekonomi, etnik, agama ataupun bahasanya. Sekolah inklusif menerima keragaman, tidak sekedar mentoleransinya. Sekolah inklusif sebagai sebuah sistem beradaptasi dengan kebutuhan setiap anak. Anak belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing dan menurut kemampuannya masing-masing untuk mencapai perkembangan akademik, sosial, emosi, dan fisiknya secara optimal. Anak penyandang cacat dan anak – anak berkebutuhan khusus lainnya serta para orang tua dan gurunya mempunyai akses ke sebuah sistem pendukung berbasis sekolah/ masyarakat maupun sistem pendukung eksternal (tanpa biaya) . Sistem tersebut dirancang untuk secara efektif merespon kebutuhan yang mungkin dihadapi anak –anak tersebut.

Sekolah inklusif mengakui bahwa inklusif menguntungkan semua anak baik dengan maupun tanpa kecacatan dan kebutuhan khusus lainnya. Mereka menyadari bahwa keragaman di kalangan siswa-siswanya merupakan suatu aset yang akan memperkaya belajar bukan menghambatnya. Oleh karena itu inklusi akan menjadikan masyarakat dan sekolah lebih baik untuk semua anak maupun untuk orang tuanya dan guru-gurunya.

Layanan bagi anak berkebutuhan khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembinaan sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah semua anak. Di Indonesia program "*Education For All (EFE)*" ini dilakukan melalui program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. Selain memprioritaskan pada kebijakan pemerataan kesempatan dan akses mendapatkan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadikan pelaksanaan pendidikan karakter sebagai program unggulan. Salah satu program yang sedang disebarluaskan dan berkaitan erat dengan penanaman pendidikan karakter adalah implementasi program pendidikan inklusif.

Kusniati (2011) : Sekolah inklusif merupakan sekolah reguler (biasa) yang menerima anak berkebutuhan khusus dan menyediakan sistem layanan yang sesuai dengan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarana. Dalam kaitannya dengan praktek pendidikan, pendidikan inklusif dipandang telah berhasil meningkatkan mutu sekolah dan pendidikan kebutuhan khusus.

Melalui pendidikan inklusif anak berkelainan dididik bersama dengan anak – anak normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Dasar Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (2015) : Pendidikan inklusif adalah sebuah filosofi dan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Implementasi konsep dan sistem pendidikan inklusif merupakan kebijakan strategis dalam upaya menjawab tuntutan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang holistik.

Rendahnya APK bagi anak berkebutuhan khusus, pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif, keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan guru dalam memberi layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesabel bagi disabilitas, kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Indonesia belum optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan strategi umum pembudayaan pendidikan inklusif yang dapat dipergunakan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah Propinsi/Kota/Kabupaten maupun para pemangku kepentingan agar kebijakan tentang implementasi pendidikan inklusif lebih cepat terwujud secara luas, merata, dan bermutu.

B. Hakikat Layanan Pendidikan.

TULKIT LIRP (2007) : Layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembinaan sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah hak semua anak. Di Indonesia program “*Education For All*” (EFA) ini dilakukan melalui program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. Selain memprioritaskan pada kebijakan pemerataan kesempatan dan akses mendapatkan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadikan pelaksanaan pendidikan karakter sebagai program unggulan. Salah satu program yang sedang disebar luaskan dan berkaitan erat dengan penanaman pendidikan karakter adalah implementasi program pendidikan inklusif.

Sekolah inklusif menerima semua anak tanpa memandang kemampuan, kecacatan, gender, status HIV, dan kesehatannya maupun latar belakang sosila, ekonomi, etnik, agama, ataupun bahasanya. Sekolah inklusif menerima keberagaman, tidak sekedar mentoleransinya. Sekolah inklusif beradaptasi dengan kebutuhan setiap anak. Anak belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing dan menurut kemampuannya masing-masing untuk mencapai perkembangan akademik, sosial, emosi, dan fisiknya secara optimal. Anak penyandang cacat dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya serta para orang tua dan gurunya mempunyai akses ke sebuah sistem pendukung berbasis sekolah / masyarakat maupun sistem pendukung eksternal (tanpa biaya). Sistem tersebut dirancang untuk secara efektif merespon

kebutuhan anak-anak tersebut. Masyarakat inklusif mengakui bahwa inklusif menguntungkan semua anak, baik dengan maupun tanpa kecacatan dan kebutuhan khusus lainnya (saling memperkaya). Mereka menyadari bahwa keragaman di kalangan siswa-siswanya merupakan suatu asset yang akan memperkaya belajar, bukannya menghambatnya. Oleh karena itu, inklusif akan menjadikan masyarakat dan sekolah lebih baik untuk semua anak maupun untuk orang tuanya dan guru-gurunya.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (2015) : Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, C ayat (1) Pasal 31 dan 32 juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, gender, kemampuan dan lain-

lain. Pemerataan akses dan peningkatan mutu, pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skill*), sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konvensi internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Right of Persons with Disabilities*) telah ditanda tangani oleh 147 negara termasuk Indonesia. Selanjutnya Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tersebut melalui undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang ratifikasi konvensi penyandang disabilitas yang disahkan melalui sidang Paripurna DPR-RI tanggal 18 Oktober 2011. Pada pasal 4 dari Convention tersebut disebutkan bahwa: “Negara-negara pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan, dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, negara-negara pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah“. Jauh sebelum dokumen tersebut diterbitkan Indonesia telah memiliki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa pemerintah Republik Indonesia harus dapat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Realita di lapangan menunjukkan bahwa belum semua warga negara Indonesia memperoleh haknya mendapatkan pendidikan sesuai dengan undang-undang. Banyak faktor yang menjadi penyebab terbatasnya akses

warga untuk mengikuti pendidikan di antaranya adalah karena faktor: (1) geografis, (2) ekonomi, (3) budaya, (4) disabilitas, (5) tuntutan pekerjaan, (6) bencana, (7) konflik, (8) bias gender dan lain-lain. Lebih lanjut SEAMEO – UNESCO menyebutkan bahwa anak-anak yang memiliki peluang untuk tidak mendapatkan pendidikan dikenal sebagai *the un-reach* yang mencakup 11 kategori yaitu :

1. Peserta didik yang berada di daerah terpencil/ terisolasi.
2. Peserta didik dari minoritas agama/ suku dan lain – lain.
3. Anak yang rentan Drop Out (DO).
4. Anak-anak dari keluarga migran, pengungsian, tidak memiliki identitas kewarganegaraan, penduduk nomaden.
5. Peserta didik penyandang cacat/ berkebutuhan khusus.
6. Pekerja anak/ anak jalanan yang diperdagangkan, anak korban kekerasan.
7. Anak di lingkungan bermasalah (daerah konflik, bencana, penjara, dan lain-lain).
8. Anak yatim/ anak terlantar.
9. Peserta didik dari keluarga miskin.
10. Anak-anak yang terkena HIV/ AIDS.
11. Anak-anak dan atau penduduk di daerah perbatasan dan para buruh migran Indonesia (TKI) di sejumlah negara.

Anak disabilitas adalah anak yang mengalami ketidak mampuan dalam melakukan fungsi tertentu, disebabkan karena adanya kerusakan (ketunaan) pada aspek perkembangan tertentu. Kondisi ini sering disebut

dengan istilah anak berkelainan, anak luar biasa, dan atau anak berkebutuhan khusus. Undang-Undang Pendidikan No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah memberikan jaminan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1). Dalam pasal 5 ayat 2 bahkan pemerintah telah memberikan instruksi bahwa mereka perlu memperoleh layanan yang khusus. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (UU No 20/2003, pasal 5 : 2).

Salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan, pemerintah sudah sejak lama menyelenggarakan sekolah khusus atau luar biasa (SLB). Data Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di 33 propinsi di Indonesia adalah 1.738 sekolah dan melayani 70.320 anak pada jejang pendidikan dasar (SDLB dan SMPLB). Data tersebut selanjutnya menyimpulkan bahwa Anak-anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh layanan pendidikan jumlahnya mencapai 74.18%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah strategis yaitu melalui pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu sistem/ strategi penyelenggaraan pendidikan, dimana anak-anak berkebutuhan khusus diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler dengan suatu layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Sebagai bukti keseriusan

pemerintah terhadap gagasan ini kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mengeluarkan peraturan khusus tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui Permendiknas No 70 tahun 2009 yang ditanda tangan pada tanggal 5 Oktober 2009.

Pendidikan inklusif telah berjalan sejak satu dasa warsa yang lalu. Data Direktorat PPK-LK tahun 2010 menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan melalui pendidikan inklusif sebanyak 15.144 siswa pada 811 sekolah reguler, dengan rincian SD 13.590 siswa di 653 sekolah, SMP 1.309 siswa di 97 sekolah, dan SMA 245 siswa di 61 sekolah. Jumlah tersebut belum ideal dibanding dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus yang ada saat ini. Artinya pendidikan inklusif masih harus terus ditingkatkan supaya dapat memberi kesempatan kepada lebih banyak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan. Di sisi lain pelaksanaan pendidikan inklusif saat ini juga masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan, di antaranya adalah : (1) Pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif. (2) Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. (3) Sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesabel bagi disabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, masih dibutuhkan upaya-upaya yang sistematis untuk membudayakan pendidikan inklusif sehingga ke depan diharapkan pelaksanaan pendidikan inklusif dapat berjalan secara

lebih baik. Untuk keperluan tersebut perlu adanya panduan tentang bagaimana upaya membudayakan pendidikan inklusif di masyarakat.

C. Tujuan Pendidikan Inklusif.

Maksud dan tujuan diselenggarakan sekolah inklusif adalah:

Pasal 2 Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau bakat istimewa, dijelaskan bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah :

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Secara umum tujuan pembudayaan pendidikan inklusif adalah menjadikan prinsip - prinsip dan nilai-nilai pendidikan inklusif sebagai acuan dalam kebijakan dan implementasi pendidikan. Kebijakan dan implementasi ini berlaku pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan, dalam rangka peningkatan pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan dalam suatu wilayah Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan atau satuan pendidikan.

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai di antaranya :

- 1) Pemenuhan hak pendidikan. Semua anak usia sekolah tanpa kecuali dapat memperoleh haknya mengikuti pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- 2) Perluasan akses pendidikan. Menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau di semua wilayah agar dapat memberikan layanan pendidikan bagi semua anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
- 3) Peningkatan mutu pendidikan.
Menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, berimbang, berwatak dan tidak diskriminatif bagi semua anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
- 4) Efisiensi biaya pendidikan. Meminimalisir pemborosan pembiayaan pendidikan sebagai akibat penggunaan sistem pendidikan yang segregatif.
- 5) Membangun karakter masyarakat inklusif. Semua komponen bersikap positif terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bermutu, berkarakter dan bermartabat.

Dengan telah diaturnya pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuannya, akan memberika pilihan kepada orang tua untuk memilih sekolah yang dianggap terbaik untuk putra/ putrinya yang memiliki kebutuhan khusus baik yang memiliki hambatan atau yang memiliki potensi

kecerdasan dan atau bakat istimewa. Pilihan bisa melalui satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan atau satuan pendidikan khusus. (PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan).

Di sisi lain dengan adanya pengaturan ini maka pemerintah dan setiap satuan pendidikan umum/ kejuruan harus mempersiapkan untuk dapat melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Pemberian kesempatan ini juga akan memberikan motivasi yang baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus, orang tua yang peserta didiknya berkebutuhan khusus dan masyarakat.

Seperti telah dikatakan bahwa berbicara pendidikan inklusif adalah berbicara semua anak (*educational for all*). Dengan diterimanya peserta didik berkebutuhan khusus di setiap satuan pendidikan umum / kejuruan berarti telah memulai untuk menyelenggarakan pendidikan yang menghargai keaneka ragaman dan diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus. Mengubah sikap sekolah terhadap image peserta didik berkebutuhan khusus tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Hal ini memerlukan kerja keras dari pihak pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk menyadarkannya. Untuk itu perlu adanya gerakan–gerakan penyadaran sikap sekolah mengenai pendidikan inklusif agar sekolah ramah dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Sosialisasi dan pembinaan– pembinaan serta bimbingan teknis, pelatihan, seminar, workshop, rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan lainnya mengenai pendidikan inklusif harus dilakukan secara terus menerus. Kegiatan desiminasi atau promosi tentang

pendidikan inklusif juga dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media. Implementasi pendidikan inklusif akan memberikan masukan bagi setiap perencana dan pelaksana pendidikan agar memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan khusus semua peserta didik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, layanan pendidikan dilakukan melalui tiga jalur yaitu :

- 1) Pendidikan Formal melalui sistem persekolahan dan perguruan tinggi.
- 2) Pendidikan non formal yang berbasis pada lembaga atau organisasi yang tumbuh di masyarakat.
- 3) Pendidikan informal yang berbasis pada keluarga.

Adanya tiga jalur ini mengindikasikan bahwa akses dan pelayanan pendidikan tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur formal yang merupakan jalur utama pelayanan pendidikan yang memiliki standar yang baku dalam pelayanan pendidikan. Tidak semua penduduk dapat mengakses dan memperoleh pelayanan pendidikan program dan kegiatan pendidikan formal karena berbagai alasan. Banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang atau kelompok masyarakat tertentu tidak dapat memiliki akses dan pelayanan pendidikan baik teknis maupun nonteknis, antara lain : (1) geografis, (2) ekonomi, kemiskinan, (3) budaya. (4) disabilitas, (5) tuntutan pekerjaan, (6) bencana, (7) Konflik dan (8) Bias gender. Oleh sebab itu untuk mengatasi berbagai masalah di atas, pemerintah melaksanakan program pendidikan inklusif.

D. Fungsi Pendidikan Inklusif.

Fungsi pendidikan inklusif adalah untuk menjamin semua peserta didik berkebutuhan khusus mendapat kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan bermutu di berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensinya. Untuk dapat menjamin semua peserta didik berkebutuhan khusus mendapat kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan bermutu, akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyiapkan kebijakan / program / kegiatan dan berbagai komponen pendukung lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensinya secara optimal adalah mutlak harus dilakukan oleh pemerintah dan sekolah. Lingkungan fisik (halaman, sarana, dan prasarana) dan non fisik (program / kegiatan / kurikulum) harus aksesibel. Sekolah dan perangkatnya (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling (konselor), laboran, pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya) harus ramah dan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif

E. Manfaat Pendidikan Inklusif.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah umum/kejuruan banyak manfaatnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik pada umumnya, orang tua, pemerintah, masyarakat dan sekolah. Manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah mereka memiliki rasa percaya diri dan memiliki kesempatan menyesuaikan diri serta memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan yang nyata pada lingkungan pada umumnya. Peserta didik berkebutuhan khusus terhindar dari label atau sebutan yang tidak baik, memahami pelajaran di sekolah dengan lebih baik dan mampu. Peserta didik berkebutuhan khusus akan lebih mandiri, dapat beradaptasi, aktif dan dapat menghargai perbedaan, serta memperoleh kesempatan bersosialisasi dan berbagi dengan peserta didik pada umumnya secara alamiah sehingga akan memberikan masukan yang sangat berarti dalam aspek kehidupannya.

Manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik pada umumnya adalah peserta didik dapat belajar mengenali keterbatasan dan kelebihan tertentu serta keunikan pada teman-temannya. Peserta didik pada umumnya akan tumbuh rasa kepedulian terhadap keterbatasan dan kelebihan peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik pada umumnya akan dapat mengembangkan keterampilan sosial, berempati terhadap permasalahan peserta didik berkebutuhan khusus dan membantu peserta didik yang berkebutuhan khusus dan teman-teman peserta didik pada umumnya lainnya yang mendapat kesulitan.

Manfaat pendidikan inklusif bagi guru adalah guru akan lebih tertantang untuk mengajar lebih baik dan dapat mengakomodasi semua peserta didik sehingga akan berupaya untuk meningkatkan wawasannya mengenai keragaman karakteristik semua peserta didik. Guru akan lebih kreatif dan terampil mengajar dan mendidik, lebih mengenali peta kekuatan dan kelemahan peserta didik. Guru dapat meningkatkan kompetensinya dalam bidang pendidikan khusus. Guru lebih terbuka terhadap perbedaan atau keberagaman peserta didik, mampu mendidik peserta didik yang lebih beragam, lebih terbiasa dan terlatih untuk mengatasi berbagai tantangan pembelajaran, sehingga guru mendapat kepuasan dalam bekerja dan pencapaian prestasi yang lebih tinggi.

Manfaat pendidikan inklusif bagi orang tua adalah orang tua merasa dihargai atau dapat meningkatkan penghargaan terhadap peserta didik. Orang tua merasa senang ketika anaknya dapat bersosialisasi dengan baik tanpa adanya diskriminasi dan akan lebih memahami cara memotivasi peningkatan belajar anaknya yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Orang tua mengetahui cara membimbing anaknya dengan lebih baik lagi dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan dalam kegiatan belajar anaknya serta mendapat kesempatan untuk sharing dengan pihak sekolah dan stakeholder lainnya dalam merencanakan pembelajaran untuk anaknya yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya, kekuatannya, kelemahannya, serta senang ketika anaknya memiliki keterampilan sosial yang baik.

Manfaat pendidikan inklusif bagi pemerintah, pemerintah dan daerah adalah kebijakan pendidikan terlaksana berlandaskan pada azas demokrasi, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Pemerintah dapat melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, serta kebijakan-kebijakan sebagai manifestasi keinginan atau harapan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga akan adanya nilai tambah kepercayaan warga negara / masyarakat kepada pemerintah. Termasuk juga kepercayaan dunia (internasional) kepada pemerintah dan pemerintah daerah karena sungguh-sungguh dalam merealisasikan komitmen-komitmen internasional berkenaan dengan pendidikan untuk semua (*Educational for All*) sehingga akan tumbuh nilai positif di mata dunia / internasional. Manfaat lainnya yaitu mempercepat / akselerasi tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Peserta didik mendapatkan hak yang sama dan mendapatkan pendidikan yang lebih luas.

Manfaat pendidikan inklusif bagi masyarakat adalah dapat memaksimalkan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat akan lebih sadar bahwa setiap peserta didik berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan seperti peserta didik pada umumnya. Masyarakat dapat menyumbangkan pemikiran, ide atau gagasan untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik lagi dengan lebih terbuka dan penuh kesadaran.

Manfaat pendidikan inklusif bagi sekolah yaitu pencitraan sekolah meningkat, sekolah lebih terbuka, ramah dan tidak mendiskriminasi. Sekolah

dapat meningkatkan mutu pendidikan secara konperhensif. Sekolah dapat meningkatkan akses bagi semua peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Pendidikan tidak diskriminatif. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik (*child-centred*). Kegiatan pembelajaran dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Perilaku guru dapat membuat peserta didik senang belajar. Lingkungan sekolah dan kelas ramah terhadap semua peserta didik. Pembelajaran berbasis gaya belajar (*learning style*) peserta didik. Pembelajaran dilaksanakan dengan aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan (PAIKEM), dan pembelajaran menghargai keberagaman.

F. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia di dasari oleh landasan filosofi, yuridis, pedagogis dan empirisme. Landasan tersebut akan memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah – sekolah.

Landasan filosofis adalah seperangkat wawasan atau cara pikir yang menjadi dasar pendidikan inklusif, meliputi filosofi Bhinneka Tunggal Ika, agama, pandangan universal, dan filosofi inklusif. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika : Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika“ (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Artinya Bangsa Indonesia mengakui keragaman dalam etnis, dialek, adat istiadat keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pandangan agama : Dalam

agama-agama di Indonesia (khususnya Islam) ditegaskan bahwa : (1) manusia dilahirkan dalam keadaan suci. (2) kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan (Allah) bukan karena fisik tetapi taqwanya. (3) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. (4) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling bersilaturahmi (inklusif). Pandangan universal hak asasi manusia menekankan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang didasari semangat keterbukaan untuk merangkul semua kalangan pendidikan. Pendidikan inklusif mengimplementasikan wawasan multi kultural dalam pendidikan yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan berfungsi fisik dan psikologis.

Landasan Yuridis didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang ada dan telah disyahkan, meliputi landasan yuridis, berskala nasional dan internasional.:

Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) Pasal 31 ayat (1) : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan dan hak yang sama dengan peserta didik pada umumnya dalam memperoleh layanan pendidikan.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5. Ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat (3) Warga negara di daerah terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Undang-Undang ini menegaskan bahwa: Negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Layanan yang bermutu bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya dan hambatan/ gangguan/ kelainan yang dimilikinya. UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal 48 : Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pasal 49 : Negara, Pemerintah, Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 51 : Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Pasal 52: Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Pasal 53 : Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat di daerah terpencil.

Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah dan orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak. Mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar minimal 9 tahun baik anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun anak-anak pada umumnya. Di pasal ini dijelaskan bahwa setiap warga negara baik yang berkebutuhan khusus maupun yang normal berhak untuk memperoleh pendidikan. Bagi warga negara yang berada di daerah terpencil berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus.

Pasal 32 UU No 20 Tahun 2003 SISDIKNAS ayat (1): Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ayat (2): Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan atau mengalami bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal ini jelas menegaskan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan sama seperti anak-anak pada umumnya.

Permendiknas No 32 Tahun 2008 tentang Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus, bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dan

satuan pendidikan kejuruan, dengan cara menyediakan sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau bakat istimewa. Pasal 1 bahwa Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Permendiknas ini menjelaskan bahwa Penyelenggara pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan, sama seperti teman sebayanya di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya.

UU No 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat. Pasal 5 ; Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.

Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pasal 127 sampai 142.

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Dediknas No380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003 : Setiap kabupaten / kota diwajibkan menyelenggarakan dan

mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang – kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

Deklarasi Bandung : Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif tanggal 8- 14 Agustus 2004 menetapkan kebijakan sebagai berikut : (a) Menjamin setiap anak berkebutuhan dengan aneka dan anak berkelainan lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal.(b) menjamin setiap anak berkebutuhan khusus dan anak berkelainan lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologi, hukum politis maupun kultural. (c) Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengelolaan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung semua anak dengan berbagai kebutuhan, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal. (d) Menjamin kebebasan antar anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi secara aktif maupun pro aktif dengan siapapun kapanpun dan di lingkungan manapun dengan meminimalkan hambatan. (e) Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan serta media lainnya secara berkesinambungan. (f) Menyusun rencana aksi (*action plan*) dan

pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan, bagi semua anak berkebutuhan khusus.

Deklarasi Bukit Tinggi (tahun 2005). Deklarasi Bukit Tinggi berisi kebijakan yang menetapkan : (a) Pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk : “Pendidikan untuk semua“ adalah benar-benar untuk semua. (b) cara untuk menjamin bahwa semua memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program – program untuk perkembangan anak usia dini, pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusif. (c) kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.

Landasan Pedagogis. Landasan pedagogis tercermin pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal anak berkebutuhan

khusus diisolasikan dari teman sebayanya di sekolah–sekolah khusus. Betapapun kecilnya mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya.

Landasan Empiris. Penelitian tentang pendidikan inklusif telah banyak dilakukan di negara–negara barat sejak 1980-an. Di antaranya, penelitian yang berskala besar dipelopori oleh *the National Academy of Sci*(Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman & Messick, 1982). Beberapa pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan anak berkelainan secara tepat, karena karakteristik mereka yang sangat heterogin (Baker, Wang, dan Walberg 1994 / 1995). Temuan survey Prisoner (2003) kepada kepala sekolah tentang sikap mereka terhadap pendidikan inklusif menunjukkan bahwa hanya satu dari lima kepala sekolah (20 %) memiliki sikap yang positif terhadap penerapan pendidikan inklusif. Sementara yang lainnya sikapnya tidak jelas. Lebih lanjut, dalam kelas yang dipimpin oleh kepala sekolah yang memiliki sikap positif tersebut, siswa lebih mungkin dididik dengan cara yang sedikit tidak dibenarkan dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian tentang sikap gur, Mcleskey Waldron, So Swanson, dan Loveland (2001) menemukan bahwa guru–guru dalam sekolah inklusif lebih memiliki sikap positif terhadap

peran guru inklusif dan dampaknya dari pada guru pada sekolah reguler. Lebih lanjut, Meyer (2001) mengatakan bahwa siswa yang memiliki kecacatan yang cukup ditemukan untuk memiliki keberhasilan yang lebih besar manakala mereka memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang menerima mereka, khususnya yang berkaitan dengan hubungan sosial dan persahabatan mereka dengan masyarakatnya.

Salah satu karakteristik terpenting dari sekolah inklusif adalah terbentuknya satu komunitas yang kohesif, menerima dan responsif pada kebutuhan individu siswa. Selaras dengan hal ini Sapon-Shevin (dalam Sunardi, 2002) mengemukakan lima profil pembelajaran di sekolah inklusif, yaitu : (1) Pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keragaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana dan perilaku sosial yang menghargai perbedaan, mencakup perbedaan kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, agama, dan sebagainya. Pendidikan inklusif berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. (2) Mengajar kelas yang heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar. Pembelajaran di kelas inklusif akan bergeser dari pendekatan pembelajaran kompetitif yang kaku mengacu materi tertentu, ke pendekatan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antar siswa, dan bahan belajar tematik. (3) Pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif.

Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode pembelajaran. Model kelas tradisional yang berfokus pada guru, berjuang sendirian mengatur dan mengendalikan siswa di kelas harus bergeser dengan model antar siswa saling bekerjasama, saling mengajar dan belajar dan aktif saling berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya. Semua anak berada di satu kelas bukan untuk berkompetisi, melainkan untuk saling belajar dan mengajar, dengan yang lain, guru memfasilitasi kebutuhan anak agar dapat berkembang maksimal. (4) Pendidikan inklusif berarti penyediaan dukungan, dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Meskipun guru selalu berinteraksi dengan orang lain pekerjaan mengajar dapat menjadi profesi yang terisolasi. Aspek terpenting dari pendidikan inklusif adalah bekerja dengan tim, kolaborasi dan konsultasi dari berbagai cara mengukur keterampilan, pengetahuan, dan bantuan individu yang bertugas membantu mendidik sekelompok anak. Kerjasama dengan orang lain secara baik memerlukan pelatihan dan dorongan secara terus menerus. (5) Pendidikan inklusif berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung kepada partisipasi aktif orang tua pada pendidikan anaknya, misalnya keterlibatan mereka dalam penyusunan Program Pengajaran Individual (PPI) dan bantuan dalam belajar di rumah.

Pendidikan inklusif harus dipromosikan dan diterapkan, sebab banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan, di antaranya :

1. Semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak didiskriminasikan dan memperoleh pendidikan bermutu.
2. Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.
3. Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak.
4. Sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda.

Dari beberapa pertimbangan di atas, maka pemerintah berusaha untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif melalui berbagai cara di antaranya :

1. Implementasi sekolah model inklusif dengan sistem gugus satelit.

Kondisi penyebaran sekolah di Indonesia yang sangat luas dan sebagian besar berada di daerah yang sulit transportasi mengharuskan adanya satu model pengembangan yang mampu memberikan kemudahan kepada sekolah, orang tua dan ABK yang berkeinginan memahami dan mengimplementasikan pendidikan inklusif yaitu dengan mempersiapkan adanya sekolah model.

2. Kampanye nasional pentingnya sekolah inklusif.

Penerimaan masyarakat Indonesia secara umum terhadap ABK masih rendah. Sebagian besar orang tua yang memiliki ABK merasa malu

dan cenderung menyembunyikan dan mengucilkan anak mereka dari pergaulan termasuk membiarkan ABK tidak mendapatkan pendidikan.

3. Peningkatan kemampuan guru, kepala sekolah dan pengawas dengan penerapan *pre – in service training*.

Saat ini pemerintah sedang melaksanakan sertifikasi kompetensi guru dan kepala sekolah. Untuk itu dorongan kuat agar kemampuan dalam mengajar siswa ABK bagi guru, kemampuan manajemen sekolah bagi kepala sekolah dan kemampuan melakukan supervisi bagi pengawas merupakan indikator penilaian yang harus dilakukan untuk menentukan kelulusannya. Bahkan layanan ABK pada sekolah reguler didorong untuk berpengaruh pada nilai akreditasi suatu sekolah.

4. Penyediaan peraturan dan pedoman teknis pendidikan inklusif yang implementatif.

Sistem pendidikan di Indonesia menganut pola kenaikan dan kelulusan. Pelaksanaan pendidikan inklusif khususnya bagi ABK yang memiliki intelektualitas di bawah standart menghadapi kendala dari aspek penilaian. Untuk itu di sekolah inklusif dibuat pedoman teknis yang lebih operasional khususnya di bidang kurikulum, pembelajaran, dan penilaian untuk jenis-jenis kebutuhan khusus.

Hambatan utama anak berkelainan untuk maju, termasuk untuk mengakses pendidikan, bukan pada kecacatannya, tetapi pada penerimaan sosial masyarakat. Selama ada alat dan penanganan khusus mereka dapat mengatasi hambatan kelainan ini. Justru yang sulit adalah

hambatan sosial. Untuk itulah pendidikan yang terselenggara hendaknya memberikan jaminan bahwa setiap anak akan mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan potensinya secara individual. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31 dan Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.

D.K. Lipsky dan A.D.Gartner (2000) mengatakan : *Inclusive education as : providing to all students, including those with significant disabilities, equitable opportunities to receive effective educational services, with the needed supplemental aids and support servise, in age-appropriate classes in their neighborhood schols, in order to prepare students for productive lives as fuul members of society.* Melalui pendidikan inklusif anak berkelainan dididik bersama–sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di masyarakat terdapat anak normal dan anakberkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Oleh sebab itu anak berkelainan perlu diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan anak normal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah terdekat.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, kesulitan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif selama ini, masih terdapat beberapa hambatan dalam merespon berbagai kebutuhan ABK yang berbeda antara lain :

1. Belum semua Propinsi, Kabupaten / Kota memiliki Perda / Surat Edaran tentang implementasi pendidikan inklusif.
2. Kurangnya komitmen Pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif
3. Sebagian besar Komite sekolah belum mengambil peran aktif dalam menunjang implementasi pendidikan inklusif.
4. Organisasi–organisasi profesi dan yang terkait dengan ABK belum berperan secara aktif dalam implementasi pendidikan inklusif.
5. Pemahaman Kepala Sekolah, guru, dan pengambil kebijakan di daerah terhadap konsep dasar pendidikan inklusif masih terbatas dan bervariasi.
6. Terbatasnya jumlah Guru Pembimbing khusus / guru kunjung dari Sekolah Khusus terdekat ke sekolah inklusif.
7. SDM yang ada di sekolah inklusif sebagian besar mengalami kesulitan dalam memodifikasi kurikulum, maupun assesmen akademik dan non akademik ABK.
8. Sebagian besar sekolah belum memiliki ruang layanan khusus.
9. Sistem penerimaan siswa baru yang menerapkan sistem *on line* tanpa ada kuota untuk ABK, menyulitkan untuk anak berkebutuhan khusus di terima di sekolah reguler.

10. Sebagian besar orang tua dan masyarakat berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya bersekolah di sekolah khusus, sedangkan sebagian berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya bersekolah di sekolah reguler untuk perkembangan sosialnya.

Apabila dibandingkan antara data anak ABK yang sudah mendapatkan layanan pendidikan baik yang berada di sekolah khusus maupun di sekolah inklusif, dengan anak usia sekolah di atas maka perbandingannya sangat jauh. Menurut data Direktorat Pembinaan PK-LK Pendidikan dasar, secara persentase, jumlah ABK yang telah bersekolah untuk jenjang SD hanya 0,00018%, dan SMP hanya 0,00012% dari total seluruh anak usia sekolah. Sedangkan persentase sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk jenjang SD adalah 0,39% dan jenjang SMP adalah 0,25%. Untuk itulah perlu dilakukan upaya terobosan dalam menyebarkan pendidikan inklusif di Indonesia, di antaranya melalui program pembudayaan pendidikan inklusif.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu ditempuh sejumlah strategi. Strategi di sini dimaknai sebagai cara atau kegiatan yang harus dilakukan supaya ide atau konsep pendidikan inklusif benar-benar membudaya dalam praktek pendidikan dan kehidupan masyarakat secara luas. Strategi tersebut dimaksudkan mencapai terbentuknya masyarakat inklusif yang ditempuh melalui tahapan proses pembudayaan inklusif. Tujuan akhir yang diinginkan

terkait dengan upaya pembudayaan (*inclusive society*) yaitu suatu kondisi kehidupan masyarakat yang terbuka, saling menerima dan saling menghargai dalam keberagaman serta perlakuan yang adil kepada setiap orang. Secara umum ada tiga tahapan proses menuju terwujudnya masyarakat inklusif yaitu : (1) Tahap Pengenalan. (2) Tahap Pengembangan. (3) Tahap Pembudayaan.

Tiga Tahapan tersebut dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan proses menuju masyarakat inklusif.

Tahapan Pengenalan. Tahap pengenalan adalah suatu tahap atau kondisi di mana masyarakat baru memulai mengenal konsep dan filosofi pendidikan inklusif. Pada tahap ini sekolah atau *stake holders* sudah memahami pendidikan inklusif namun belum memulai melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengimplementasikan konsep pendidikan inklusif.

Tahap Pengembangan. Tahap pengembangan adalah tahap atau kondisi yang lebih maju dari tahap pengenalan. Pada tahap ini masyarakat dan berbagai *stake holders* sudah mulai melakukan aktivitas konkrit untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Misalnya, sekolah sudah mulai

menerima dan melayani siswa berkebutuhan khusus, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan atau regulasi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, guru – guru sekolah inklusif sudah mulai memahami dan memiliki sedikit kemampuan dalam memberi layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, sudah ada upaya untuk mengadakan sarana pendukung bagi pelaksanaan pendidikan inklusif.

Tahap pembudayaan adalah tahap di mana ide, ciri atau karakteristik pendidikan inklusif sudah dijalankan secara sistemik, konsisten dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Pada tahap ini, semua *stake holders* dan elemen masyarakat memiliki cara pandang, sikap dan perilaku yang inklusif. Agar proses pembudayaan pendidikan inklusif berhasil untuk menuju masyarakat inklusif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan landasan kerja yaitu :

a) Kolaborasi. Upaya untuk mebudayakan pendidikan inklusif harus dilaksanakan secara kolaboratif (kerja bersama) antara berbagai elemen yang ada di masyarakat. Elemen – elemen tersebut adalah : pihak sekolah, pengawas, unsur pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan, unsur kementerian pendidikan, orang tua siswa komite sekolah, dewan pendidikan dan masyarakat secara lebih luas.

b) Bertahap dan berkelanjutan. Upaya pembudayaan pendidikan inklusif dalam rangka mewujudkan masyarakat inklusif merupakan upaya yang dilakukan secara bertahap, dari mulai upaya pengenalan,

pengembangan dan pembudayaan. Proses kegiatan ini perlu waktu dan upaya yang terus menerus dan bertahap untuk sampai pada terwujudnya masyarakat inklusif.

c) *Kemauan dan Komitmen*. Upaya pembudayaan pendidikan inklusif hanya akan berjalan secara baik jika diawali dengan adanya kemauan dan komitmen untuk peduli terhadap pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif bukan hanya sekedar melaksanakan program dari pemerintah tetapi lebih merupakan bentuk komitmen kita untuk memberi kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan supaya mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal sebagai bekal hidup di masyarakat.

d) *Fleksibel*. Upaya pembudayaan pendidikan inklusif harus dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Setiap pelaksana pengembang pendidikan inklusif harus arif dalam mencermati situasi lingkungan setempat sebagai dasar dalam memilih dan menentukan cara dalam melaksanakan pembudayaan pendidikan inklusif.

e) *Right-based*. Upaya pembudayaan pendidikan inklusif harus berangkat dari pemikiran bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan hidup secara layak sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sangat menguntungkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, orang tua dan masyarakat, karena memiliki banyak segi positif antara lain :

1. Membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif.
2. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi.
3. Semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah.
4. Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.
5. Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak.

Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pendidikan inklusif ini hanya bisa diterapkan di sekolah inklusif yaitu sekolah yang merupakan perkembangan baru dan pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran, sampai pada sistem penilaiannya.

Hal-hal yang harus diperhatikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di antaranya adalah :

1. Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keaneka ragaman, dan menghargai perbedaan.
2. Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen, dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individu.
3. Guru harus menerapkan pembelajaran interaktif.
4. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
5. Guru dituntut melibatkan orang tua, secara bermakna dalam proses pendidikan

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus memperhatikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan, agar penyelenggaraan pendidikan inklusif inidapat terlaksana dengan optimal. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Prinsip pemerataan dan Peningkatan mutu. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena lembaga pendidikan inklusif bisa menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi

pembelajaran bervariasi yang bisa memberikan akses bagi semua anak dan menghargai perbedaan.

2. Prinsip Kebutuhan individual. Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak.
3. Prinsip kebermaknaan. Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.
4. Prinsip keberlanjutan. Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.
5. Prinsip keterlibatan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus membentuk tim sekolah inklusif, dan membangun kerjasama dengan baik, untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Adapun yang termasuk tim sekolah inklusif adalah : orang tua, guru reguler, guru pembimbing khusus, sistem sekolah representatif, seorang yang dapat diajak untuk mengevaluasi perkembangan anak, seorang yang representatif pada sistem sekolah, berbagai ahli yang menguasai pengetahuan tentang anak, dan siswa baik reguler maupun yang berkebutuhan khusus

Dengan adanya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, banyak keuntungan yang diperoleh, baik dari pihak pemerintah, sekolah, masyarakat maupun peserta didik, baik yang berkebutuhan khusus

maupun yang normal, antara lain : siswa yang lamban belajarnya, dapat maju menurut kemampuan masing-masing secara tepat, mencegah adanya ilusi dalam kemajuan, tetapi bersifat nyata mata pelajaran dan pertumbuhan yang bersifat pendidikan bukan pada tuntutan guru. cenderung mengusahakan perhatian anak terhadap hasil belajar perorangan, memungkinkan siswa maju secara optimal dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, latihan-latihan untuk memperoleh pembiasaan sehingga hasil yg dicapai merasa puas, menciptakan adanya hubungan pribadi yang menyenangkan antara guru dan siswa, adanya latihan-latihan berinisiatif bagi anak yang dianggap lebih cakap, mengurangi hambatan dan mencegah eliminasi anak-anak yang lamban.

Indikator keberhasilan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sangat penting. Indikator adalah petunjuk atau ciri yang menandai bahwa proses pembudayaan dianggap sudah selesai. Indikator keberhasilan penting untuk ditunjukkan supaya semua pihak yang terkait dengan program pembudayaan inklusif dapat mengetahui dan mengukur sejauh mana program yang telah dijalankan telah mencapai hasil.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Program Pendidikan Inklusif.

Bidang Kegiatan	Indikator	
Kebijakan / regulasi	Tersedia peraturan / perundangan yang	Kebijakan / Peraturan di tingkat nasional (UU, PP, Permen) dll.
	memberi landasan hukum terhadap pelaksanaan	Kebijakan / Peratuaran di tingkat Propinsi (Perda , Pergub, SK, Edaran, Panduan)
	pendidikan inklusif.	Kebijakn / Peratuaran di tingkat Kabupaten / Kota (Perdsa, Perbup / Perwali, SK, Edaran, Panduan) dll.
		Kebijakan / Peraturan di tingkat satuan pendidikan (pembentukan kordinator pelaksana pendidikan inklusif, panduan, job, deskripsi).
Sistem dukungan	Terbentuk pokja di tingkat nasional / propinsi / kabupaten / kota / kecamatan	
	Terbentuk pusat sumber untuk mendukung sekolah inklusif.	
	Tersedia dukungan sarana prasarana untuk sekolah inklusif.	
	Tersedia dukungan pendanaan khusus (Bansos) untuk sekolah inklusif.	

	Tersedia GPK untuk setiap sekolah inklusif.
	Terelenggara bimbingan teknis (pelatihan) untuk guru di sekolah inklusif.
NSPK	Tersedia pedoman / Panduan / Juklak / Juknis / SPM / SOP tentang pelaksanaan pendidikan inklusif.
Networking	Tersedia MoU dengan lembaga lain untuk mendukung pendidikan inklusif.
	Terselenggara kegiatan bersama dengan pihak lain untuk mendukung pendidikan inklusif.
	Tersedia forum GPK.
	Tersedia forum guru sekolah inklusif.
	Tersedia forum kepala sekolah inklusif.
	Tersedia forum orang tua ABK.
Pemahaman dan Kesadaran	Terlaksana sosialisasi melalui seminar / ceramah / pelatihan / workshop.
	Terlaksana sosialisasi melalui brosur / leaflet / poster.
	Terlaksana sosialisasi melalui spanduk / banner / baliho.
	Terlaksana sosialisasi melalui media radio.
	Terlaksana sosialisasi melalui media TV.
	Terlaksana sosialisasi melalui koran, / majalah / bulletin.
	Terlaksana sosialisasi melalui kegiatan deklarasi / pencanangan.

	Terlaksana sosialisasi melalui media facebook / twitter / blog.
Data dan sistem informasi	Terlaksana pendataan sensus ABK.
	Tersedia dokumen / pangkalan data tentang ABK dan pendidikan inklusif.
	Tersedia website / blog sebagai media informasi tentang pendidikan inklusif.

Strategi pembudayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat dibutuhkan. Untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif perlu ada upaya untuk pembudayaan pendidikan inklusif. Agar upaya pembudayaan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan secara efektif perlu ditempuh strategi kerja yang tepat. Berikut ini disajikan beberapa strategi kerja dalam pembudayaan pendidikan inklusif yaitu :

1. Penguatan kebijakan reguler Faktor lain yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pendidikan inklusif adalah adanya komitmen bersama yang dituangkan dalam sebuah regulasi yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat. Bentuk kebijakan yang dapat dibuat oleh pemerintah daerah di antaranya adalah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur / Bupati, surat keputusan, instruksi atau apapun yang memiliki kekuatan yang mengikat bagi semua pihak / elemen untuk menjalankan pendidikan inkluiif secara bermutu. Ada dua jenis kebijakan yang dapat dibuat di tingkat pemerintah daerah yaitu :

Kebijakan yang bersifat umum yang berfungsi sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pendidikan inklusif dan kebijakan yang bersifat teknis yang berfungsi sebagai rambu-rambu atau pedoman bagi para pelaksana pendidikan inklusif di lapangan. Kandungan dari kebijakan yang dibuat harus mencakup jaminan atau pengaturan tentang hal-hal pokok antara lain : Penerimaan siswa berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah reguler, aksesibilitas lingkungan dan sarana bagi ABK di sekolah inklusif, modifikasi kurikulum dan pembelajaran, Modifikasi evaluasi, Dukungan pembiayaan dan lain-lain.

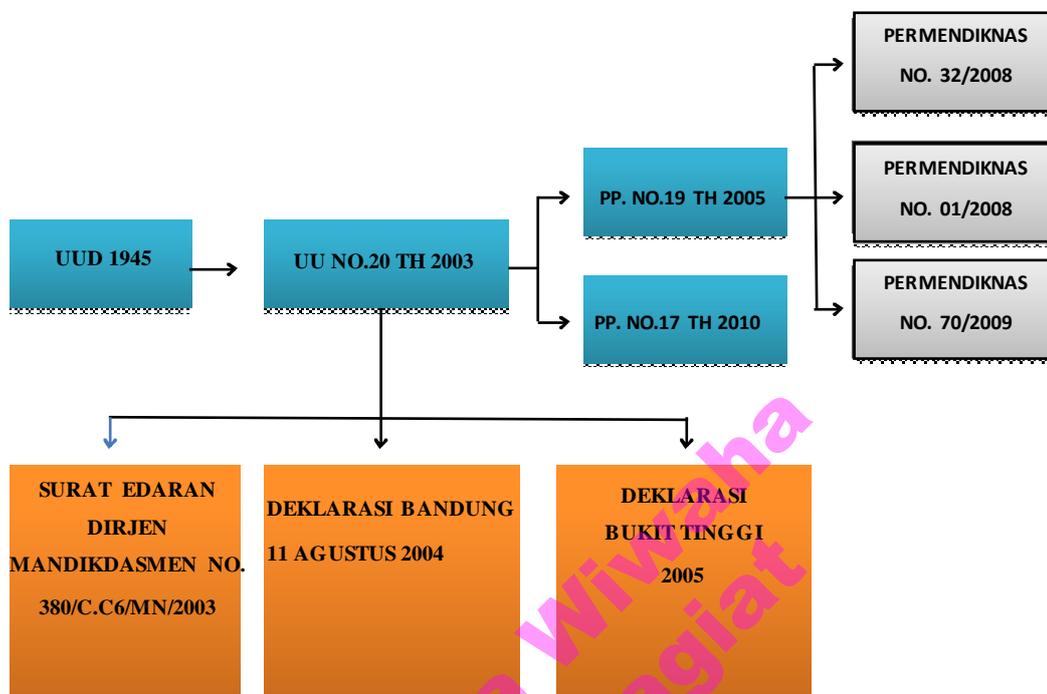
Hambatan atau kendala yang dirasakan oleh semua pihak khususnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sumber daya manusia, sehingga untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu adanya semacam persyaratan yang harus dimiliki oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah menuangkannya dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan sebagai berikut :

Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Kriteria penyelenggara pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan

peraturan Menteri. Hambatan lain yang ditemui di lapangan adalah sistem manajerial dan teknis penyelenggaraan inklusif. Untuk memenuhi kebutuhan ini maka pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Dengan adanya regulasi, kebijakan, program dan kegiatan yang jelas hal ini memberikan kekuatan dan kepercayaan kepada pemerintah kabupaten/ kota, sekolah dan masyarakat. Regulasi dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Gambar 2. Regulasi Pendidikan Inklusif



2. Pembentukan dan Pembudayaan Pokja Pendidikan Inklusif. Kelompok Kerja (POKJA) pendidikan inklusif adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan pelaksanaan pendidikan inklusif di suatu daerah/wilayah. Tugas utama POKJA inklusif adalah merancang konsep pengembangan pendidikan inklusif, memantau pelaksanaannya serta mengkoordinasikan beberapa elemen untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif.
3. Penyusunan *grand design* Pendidikan Inklusif. Salah satu indikator besarnya komitmen terhadap penyelenggara pendidikan inklusif ditandai adanya *grand design* pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Grand design adalah pendidikan inklusif adalah cita-cita dan rencana kerja mengenai pendidikan inklusif di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. *Grand design* memuat rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, analisis, SWOT, strategi pencapaian dan program kerja.

4. Sosialisasi dan publikasi. Menyadari bahwa pendidikan inklusif adalah sebuah filosofi baru dalam dunia pendidikan yang humanis, tidak diskriminatif, dan berbasis pada pengembangan kompetensi anak, maka program penyelenggaraan pendidikan inklusif perlu dilakukan publikasi secara konperhensip dan berkelanjutan. Media yang dapat digunakan untuk mempublikasikan pendidikan inklusif ini di antaranya melalui : a. Pemanfaatan media elektronik, baik dalam bentuk pembuatan *web* maupun jejaring sosial berbasis ICT. b. Media cetak, baik berupa jurnal, maupun dalam bentuk leaflet, spanduk, binder, baleho, dan sejenisnya. c. Kegiatan ilmiah dan promosi seperti : seminar, lokakarya, simposium, dialog interaktif, diskusi maupun kegiatan ilmiah lainnya. d. Pameran dan promosi yang dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Strategi potensial dalam mempercepat pembudayaan pendidikan inklusif melalui program peningkatan kapasitas SDM melalui beberapa kegiatan strategis seperti : diklat, workshop, seminar simposium, lokakarya, temukarya, dan sejenisnya. Kompetensi yang perlu dikembangkan bagi pelaku penyelenggara pendidikan inklusif diutamakan pada dua bidang yaitu :

Penguatan pemahaman konsep dan prinsip – prinsip pendidikan inklusif dan Ketrampilan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

6. Program Pendampingan Sekolah inklusif. Pendampingan sekolah inklusif adalah suatu layanan profesional yang diberikan kepada lembaga penyelenggara pendidikan inklusif yang diberikan oleh Perguruan Tinggi, Sekolah Luar Biasa, organisasi profesi, organisasi sosial dan lembaga–lembaga lain yang kompeten di bidang pendidikan khusus. Tujuan pendampingan ini adalah untuk mempercepat perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif di suatu lembaga.
7. Pengembangan Model Sekolah Inklusif. Budaya meniru diakui sangat kuat dalam pembudayaan suatu konsep atau kebijakan di Indonesia, oleh sebab itu pengadaan sekolah model pendidikan inklusif baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/ Kota dipandang cukup strategis. Pengadaan sekolah model dimaksudkan agar dapat dipergunakan sebagai rujukan bagi lembaga/ sekolah lain yang akan mengembangkan pendidikan inklusif. Ada beberapa aspek penting yang harus dipenuhi ketika sebuah sekolah akan dikembangkan menjadi sekolah model inklusif antara lain :
 - a) Guru–guru, kepala sekolah, dan staf lainnya harus sudah memperoleh pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif.
 - b) Guru–guru sudah memperoleh pelatihan dasar tentang bagaimana memahamidan melayani anak berkebutuhan khusus.

- c) Tersedia Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah tersebut.
 - d) Tersedia ruang sumber (*resource room*) sebagai sarana pendukung.
 - e) Lingkungan fisik sekolah ditata supaya *aksesible* bagi siswa berkebutuhan khusus.
 - f) Sistem pelayanan pembelajaran divariasikan sehingga bisa mengakomodir (melayani) siswa berkebutuhan khusus.
 - g) Tersedia sejumlah sarana dan prasarana khusus untuk mendukung pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus.
 - h) Ada kerjasama dengan pusat sumber.
8. Pemberian Penghargaan. Penghargaan diberikan kepada seseorang atau lembaga yang sukses menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memberikan motivasi bagi siapa saja yang terbukti berprestasi atau memiliki kontribusi besar dalam upaya penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Di sisi lain pemberian penghargaan adalah bentuk pendidikan tidak langsung bagi masyarakat agar senantiasa selalu berupaya yang terbaik dalam memberi pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan profesinya.
9. Pemberian Bantuan Sosial. Bantuan sosial adalah salah satu bentuk pembinaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif baik berupa finansial maupun bentuk lain yang bersifat tidak mengikat. Bantuan sosial juga akan menjadi pemicu semangat dan keyakinan pihak sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, karena merasa ada perhatian dan dukungan yang serius dari pihak lain.

10. Penguatan Pangkalan Data Informasi (PADATI). Permasalahan mendasar di Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah lemahnya data pendukung yang valid dan reliable. Kondisi ini perlu segera diatasi melalui pengadaan pangkalan data dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Ada tiga tahapan kegiatan yang perlu dilakukan terkait dengan penguatan pangkalan data yaitu : Pendataan, Data *based* dan Sistem informasi berbasis web Pendataan. Pada tahap ini pemerintah daerah atau pokja melakukan pendataan (sensus) ke sekolah atau masyarakat. Pendataan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang jumlah anak berkebutuhan khusus, baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah.

Data *based*. Data ABK yang sudah terkumpul disimpan dalam bentuk data *based* berbasis computer. Sehingga akan memudahkan untuk menampilkan data apapun tentang ABK. Sistem informasi berbasis web. Sistem informasi berkaitan dengan sistem penyajian data sebagai informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Data-data tentang ABK dan tentang pendidikan inklusif disajikan dalam suatu website, sehingga mudah diakses oleh siapaun yang memerlukan.

11. Membangun komitmen bersama melalui *networking*. Upaya pembudayaan pendidikan inklusif juga dapat dilakukan dengan cara membangun dan memperkuat kerjasama antar berbagai pihak yang terkait. Pihak - pihak yang dimaksud antara lain : sekolah inklusif, sekolah luar biasa, perguruan tinggi, pokja pendidikan inklusif, dinas

pendidikan, komite sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, dewan pendidikan, kementerian pendidikan dan lain-lain.

12. Monitoring dan evaluasi. Hal yang tidak boleh dilupakan sebagai bagian dari upaya pembudayaan pendidikan inklusif adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan perkembangan pendidikan inklusif dari waktu ke waktu. Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai serta kendala-kendala yang dihadapi selama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

G. Mengubah Paradigma dan Membangun Komitmen dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pro dan kontra dalam kehidupan sering terjadi. Menyatukan keinginan, menyamakan pendapat, mensinergikan hati ternyata begitu sulit. Ketika ada perubahan, sebagian pihak kadang meragukan dan bahkan menolaknya, semua ini dilatarbelakangi oleh cara pandang seseorang dan kepentingan diri karena sudah merasa yakin dan benar atas tindakan yang telah dilakukan, atau sudah berada pada zona nyaman, sehingga ia akan selalu mempertahankan konsep yang selama ini dianggap paling benar dan tidak mau mengubah paradigma. Seperti ketika digulirkannya konsep pendidikan inklusif. Penolakan kerap muncul tanpa dikaji dulu makna positif yang terkandung di dalamnya. Di lain pihak karena akses pendidikan dengan memperhatikan kriteria atau tolok ukur yang terkandung dalam makna inklusif sulit dipenuhi atau tidak mudah terlihat, maka dengan mudahnya mengatakan bahwa pendidikan inklusif

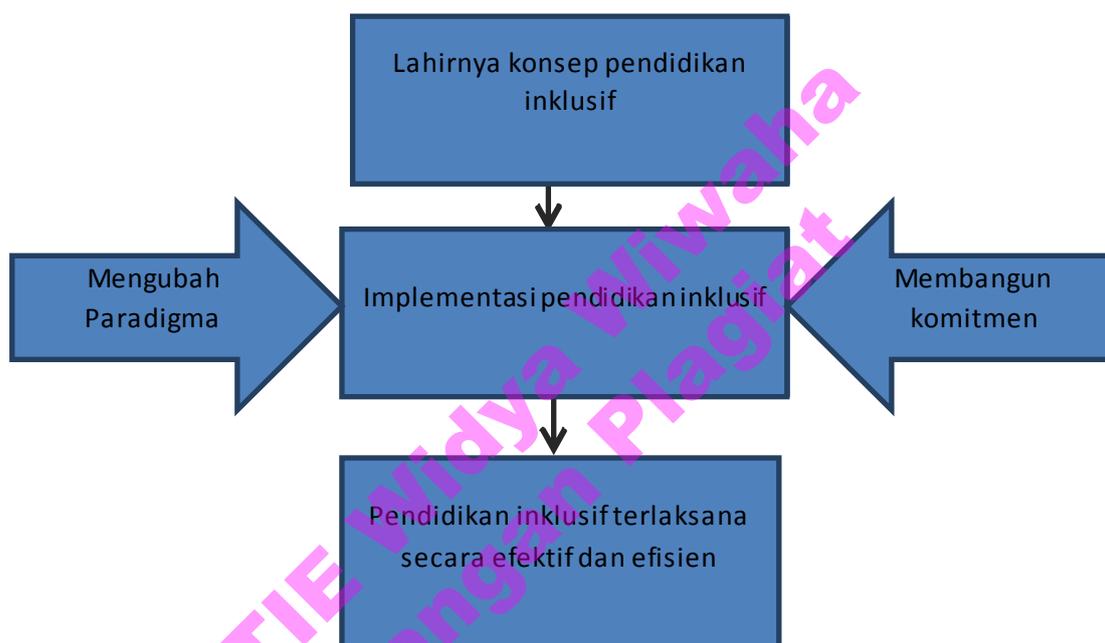
hanya seperti ilusi karena menganalisisnya tanpa hati. Ketika pendidikan inklusif mulai dikenalkan dan kemudian diimplementasikan yang diawali dengan adanya penjelasan pasal 15 Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Khusus merupakan penyelenggara pendidikan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Sejak itu tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan inklusif di negeri tercinta ini telah mengalir seperti air bening dari pegunungan. Pendidikan inklusif adalah sebuah harapan atau tujuan dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Lahirnya paradigma pendidikan inklusif sarat dengan muatan kemanusiaan dan penegak hak – hak asasi manusia. Inti dalam paradigma pendidikan inklusif yaitu sistem pemberian layanan pendidikan dalam keragaman, dan falsafahnya yaitu menghargai perbedaan semua peserta didik.

Dengan menyelenggarakan pendidikan inklusif sebenarnya sekolah telah mengadakan perubahan. Perubahan itu menyeluruh pada setiap aspek atau garapan bidang pendidikan. Perubahan paradigma perlu diikuti komitmen yang tinggi dari semua warga sekolah. Secara arif dan bijaksana kepala sekolah merangkul perbedaan dan memperkaya pemahaman dari semua warga sekolah sehingga terbangun komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Masyarakat diharapkan memahami dan antusias terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dengan antusiasnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif

maka pendidikan inklusif akan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Mengubah paradigma dan membangun komitmen dalam implementasi pendidikan inklusif dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

Gambar 3. Mengubah paradigma dan membangun komitmen dalam implementasi pendidikan inklusif.



Kerangka Penelitian

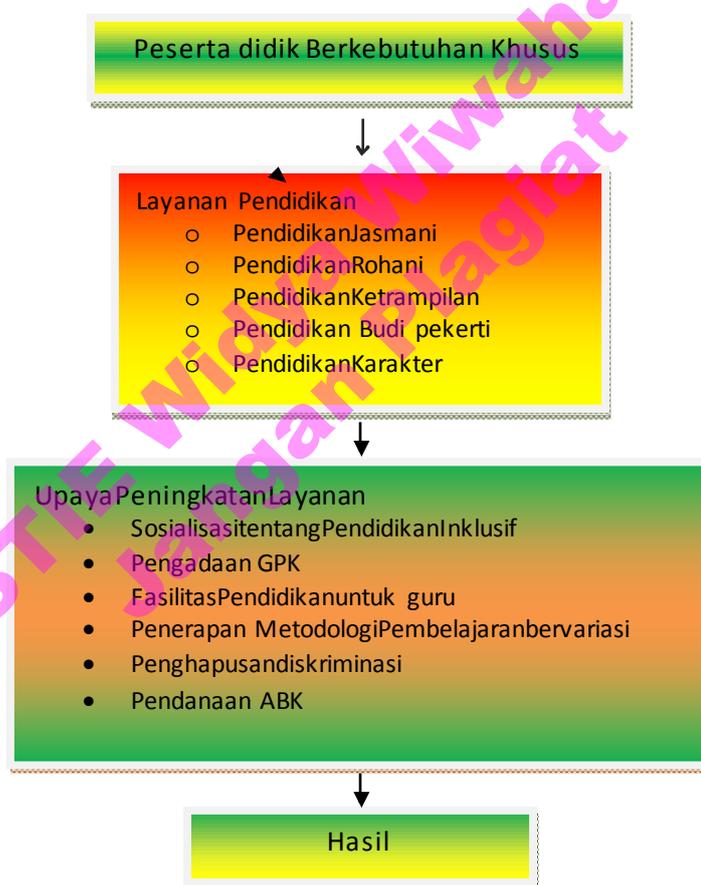
Pendidikan inklusif adalah sebuah filosofi. Pendidikan inklusif adalah sebuah visi. Pendidikan inklusif adalah sebuah harapan dan tujuan dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Pendidikan inklusif adalah sebuah konsep atau pendekatan yang berusaha menjangkau semua individu tanpa kecuali.

Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan sebagai sekolah inklusif berusaha untuk memberikan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa tanpa

membedakan dan tidak diskriminatif. Layanan ini diberikan agar anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sini mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak-anak sebayanya, sehingga mereka merasa senang dan nyaman bersekolah di sini.

Agar penjabaran dalam penelitian ini terarah dan jelas, maka perlu dibuat kerangka konseptual yang dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

Gambar 4. Kerangka Penelitian



Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat diuraikan bahwa Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sebagai penyelenggara Pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk

mengikuti pendidikan atau pembelajaran bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sekolah memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya pembedaan dan tidak diskriminatif. Layanan pendidikan ini diberikan melalui pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran di luar kelas dan pembiasaan. Semua siswa diberikan layanan pendidikan sama. Mereka baik siswa berkebutuhan khusus maupun siswa yang normal memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, terdapat 12 peserta didik berkebutuhan khusus yang dijadikan subjek penelitian ini dikarenakan layanan pendidikan yang diberikan sekolah kepada anak berkebutuhan khusus kurang optimal. Kurang optimalnya layanan tersebut disebabkan banyak faktor, di antaranya : kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusif, tidak adanya Guru Pembimbing khusus (GPK), keterbatasan keterampilan dan pengetahuan dari para gurugantung pendidikan inklusif, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus dan masih adanya anggapan bahwa anak berkebutuhan khusus sekolahnya di sekolah luar biasa (SLB). Agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka dibuatlah prosedur dan langkah-langkah penelitian sebagai berikut : (1) Mendata siswa yang berkebutuhan khusus, (2) Menganalisis kebutuhan Siswa dan layanan yang diberikan sekolah.(3) Mengidentifikasi faktor –faktor penyebab kurang optimalnya layanan pendidikan. (4) Melakukan upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Upaya tersebut dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan layanan pendidikan terhadap anak

berkebutuhan khusus yang ada di SDN Sekar II, yang dirasa selama ini belum optimal. Kurang optimalnya layanan pendidikan ini menjadikan tantangan bagi para guru di SDN Sekar II untuk meningkatkan kompetensinya melalui berbagai cara, agar mereka dapat memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah berupaya untuk meningkatkan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus agar anak-anak dan orang tua bisa senang dan puas dengan layanan yang diberikan sekolah.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan / Disain Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Penelitian Tindakan Sekolah merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang telah dilakukan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, dalam hal ini pendidikan inklusif. Penelitian ini melibatkan kepala sekolah, guru dan peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada sekolah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sehingga dapat dijadikan tolok ukur untuk kemajuan pendidikan di sekolah tersebut. Penelitian tindakan sekolah ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas bidang pendidikan dengan memberikan suatu tindakan yang dalam pelaksanaannya sangat memperhatikan proses dan hasil. Implikasinya sangat positif bagi keprofesian praktisi yang bersangkutan.

Tujuan utama penelitian tindakan sekolah adalah untuk memecahkan masalah yang terjadi di sekolah, yang bertujuan tidak saja untuk memecahkan masalah tetapi sekaligus mencari jawaban sehingga masalah itu dapat dipecahkan melalui tindakan yang dilakukan. Penelitian ini juga harus bisa memberikan solusi atas masalah yang terjadi di sekolah tersebut.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penelitian tindakan sekolah antara lain :

1. Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) merupakan penelitian yang mengikutsertakan secara aktif peran kepala sekolah, guru dan peserta didik.
2. Kegiatan renungan, pemikiran dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional, mantap dan valid guna melakukan perbaikan dalam upaya memecahkan masalah yang terjadi.
3. Tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi yang dilakukan dan bersifat praktis.

B. Definisi operasional

Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan adanya sekolah inklusif di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, yang memberikan layanan pendidikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), sehingga dapat diketahui sejauh mana layanan yang diberikan sekolah terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan sejauh mana hasil yang dicapai oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam menerima layanan tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2018 Dimulai dari pendataan siswa yang termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2018, kemudian mengidentifikasi penyebab kurang optimalnya layanan pendidikan terhadap Anak

Berkebutuhan Khusus (ABK), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2018, lalu menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2018, kemudian menganalisis layanan yang diberikan sekolah terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2018 dan mengevaluasi hasil layanan yang diberikan oleh sekolah terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yang belajar di sekolah tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018

C. Populasi dan sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa yang berkebutuhan khusus yang ada di Sekolah Dasar negeri Sekar II, kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dan guru-guru. Dari hasil pendataan, ditemukan bahwa di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, terdapat siswa yang termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebanyak 12 siswa, yang terdiri dari 11 siswa menyandang lamban belajar, dan 1 siswa berkesulitan belajar. Sejumlah 12 siswa yang berkebutuhan khusus inilah yang menjadi subyek penelitian ini. Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ini membutuhkan layanan pendidikan sebagaimana layaknya anak sebayanya yang sama-sama belajar di sekolah tersebut. Di sini Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan memberikan layanan pendidikan sepenuhnya terhadap

mereka Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK), sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan tanpa membedakan kondisi anak-anak tersebut dengan anak-anak sebayanya yang sama-sama menuntut ilmu di sekolah tersebut.

Di setiap tingkat kelas memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yaitu kelas I ada 2 siswa, kelas II ada 2 siswa, kelas III ada 1 siswa, kelas IV ada 1 siswa, kelas V ada 2 siswa dan kelas VI ada 4 siswa. Adapun yang mengalami kesulitan belajar ada 1 siswa yaitu yang duduk di kelas IV, sedangkan yang lainnya mengalami lamban belajar.

D. Data dan sumber Data.

a. Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan tujuan penelitian yang akan diteliti yaitu upaya peningkatan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi dan penemuan langsung di lapangan.

Data tersebut adalah: pengamatan langsung terhadap masyarakat sekitar yang kurang paham dan kurang antusias pada pendidikan inklusif, tidak adanya guru pembimbing khusus di sekolah inklusif, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan para guru tentang pendidikan inklusif, kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus dan masih adanya anggapan bahwa anak berkebutuhan khusus sekolahnya harus di sekolah luar biasa

b. Sumber data

Sumber data dari penelitian adalah subjek darimana data diperoleh (Arikunto: 172). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu wawancara dan pengamatan langsung dari hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya serta foto-foto kegiatan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap 12 siswa berkebutuhan khusus dan 8 guru.

E. Instrumen Penelitian.

a. Pengembangan instrumen.

Pengembangan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 12 siswa yang berkebutuhan khusus dan bapak ibu guru. Observasi: teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Di sini ada 8 guru yang diobservasi. Dalam observasi penelitian ini menggunakan alat observasi dengan cara memberi tanda ceklis (V) pada layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Pengamatan dilakukan secara langsung di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Metode observasi dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan objek penelitian yaitu data-data tentang proses pembelajaran, baik yang dilaksanakan di dalam kelas maupun yang dilaksanakan di luar kelas

b. Kriteria Keabsahan Data.

Ismawati (2012 : 16 – 17) mengatakan ada empat kriteria keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu: keterpercayaan (*credibility*), keterahlian (*transferability*), kebergantungan (*dependenability*), dan kepastian (*confirmability*). Kriteria keterpercayaan (menggantikan validitas internal pada non kualitatif) berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuannya dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Kriteria keterahlian (validitas eksternal pada nonkualitatif: generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar sampel yang representatif) bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Kriteria kebergantungan lebih luas konsepnya dari pada reabilitas pada nonkualitatif, karena peninjauannya memperhitungkan segala macam

faktor yang terkait. Kriteria kepastian objektivitas pada nonkualitatif bergantung bukan pada persetujuan beberapa orang melainkan pada data.

F. Pengumpulan data

a. Wawancara.

Wawancara adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menggali suatu informasi tertentu yang dibutuhkan dari salah satu nara sumber secara langsung. Cara ini merupakan tahapan yang dilalui untuk mendapatkan data primer dari informasi sesuai dengan kajian atau fokus penelitian.

Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Apabila kita mampu untuk melakukan sebuah wawancara dengan teknik yang baik dan benar, maka kita akan memperoleh informasi yang kita butuhkan dengan perasaan senang hati.

b. Observasi.

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang berkepentingan langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan (observer partisipatif) untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi situasi dan kondisi. Teknik ini digunakan bila penelitian digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Sifat: tidak ada interaksi antara objek yang diamati dengan pengamat / pengumpul data.

Ada instrumen penelitian untuk menguatkan data observasi, yaitu melakukan pendokumentasian dengan kamera foto. Foto dapat memberikan data diskriptif yang cukup berharga mengenai suatu peristiwa atau fenomena.

G. Metoda Analisis Data.

Data yang diperoleh nantinya dianalisis dengan model alur. Analisis data disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu: upaya peningkatan layanan pendidikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan.

Dalam penelitian ini digunakan metoda analisis data kualitatif. Metoda kualitatif memberikan kelebihan dalam hal kedalaman analisis yang diperlukan pada bidang sosial. Metoda analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini tidak memerlukan hitungan angka. Penelitian ini membutuhkan kualitas untuk membuktikan hasil penelitian. Data yang diperoleh adalah: masyarakat kurang paham tentang

pendidikan inklusif. Sebagian besar masyarakat masih merasa malu terutama mereka yang memiliki anak berkebutuhan khusus, untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan mereka melarang anaknya untuk bergaul dengan teman-temannya. Sehingga mereka, anak-anak berkebutuhan khusus menjadi terisolir dari pergaulan masyarakat setempat.

Di SDN Sekar II tidak ada guru pembimbing khusus. Keberadaan guru pembimbing khusus di Kabupaten Pacitan sangat minim. Jangankan untuk sekolah inklusif, untuk sekolah luar biasa saja masih kurang.

Pengetahuan dan keterampilan guru-guru tentang pendidikan inklusif masih sangat terbatas. Latar belakang pendidikan guru-guru di SDN Sekar II bukan dari pendidikan luar biasa, tetapi dari pendidikan umum.

Sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus masih kurang. Di SDN Sekar II sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus, misalnya alat-alat keterampilan, lapangan tenis lapangan olah raga sepak bola belum ada.

Masih terdapat anggapan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus harus sekolah di sekolah luar biasa. Mereka belum mau menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tempat anak mereka bersekolah. Mereka belum paham bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sama seperti anak normal lainnya.

a. Penyajian data.

Penyajian data berupa sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang disusun, diatur, diringkas dalam bentuk kategori-kategori, sehingga mudah dipahami makna yang terkandung di dalamnya. Bentuk penyajian data kualitatif, yaitu: teks naratif berupa catatan lapangan, dan tabel tentang anak berkebutuhan khusus.

b. Penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari data penelitian tentang upaya peningkatan layanan pendidikan sekolah inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan yang telah dipaparkan dalam bentuk kalimat yang lebih singkat akan tetapi mengandung pengertian yang luas. Kesimpulan ini menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan yang harus ditindak lanjuti sebagai implementasi sekolah atas layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Data.

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil pembahasan dan penelitian tentang upaya peningkatan layanan pendidikan sekolah inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Sebagai sekolah inklusif, Sekolah Dasar Negeri Sekar II, menyelenggarakan pendidikan inklusif dan memberikan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut.

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang ditempuh antara lain :

1. Mengadakan pendataan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sekaligus mendata ketunaan yang mereka sandang, sehingga memudahkan sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang dibutuhkan mereka.
2. Mendata kebutuhan pendidikan yang dibutuhkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan data ketunaan yang disandang oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebut.
3. Menganalisis layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

4. Mengamati langsung kegiatan yang dilakukan guru dan siswa yang termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan wawancara dan melihat hasil karya mereka.
5. Mengidentifikasi penyebab kurang optimalnya layanan pendidikan yang diberikan Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
6. Melakukan upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Dari hasil penelitian di peroleh data – data siswa berkebutuhan khusus sebagai berikut : Jumlah siswa yang berkebutuhan khusus ada 12 siswa, yang terdiri dari siswa laki-laki ada 9 siswa dan yang perempuan ada 3 siswa. Dari 12 siswa ini meliputi : kelas I ada dua siswa, laki-laki semua. Kelas II ada dua siswa perempuan semua. Kelas III ada satu siswa laki laki. Kelas IV ada satu siswa laki- laki. Kelas V ada dua siswa, satu laki-laki dan satu perempuan. Kelas VI ada empat siswa laki-laki semua. Adapun nama-nama siswa tersebut adalah :

1. Agta Favian Ramadhana kelas I
2. Rio Saputra kelas I.
3. Defita Purnama Sari kelas II
4. Nova Anggraini kelas II
5. Arival Maulana kelas III
6. Angga Tri Prayuda kelas IV
7. Dwi Nur Lisa Ramadhani kelas V

8. Panji Wahyu Saputra kelas V
9. Alex Dinda Remaja kelas VI
10. Iis Rio Hartanto kelas VI
11. Eko Wahyudi kelas VI
12. Farid Putra Safarudin kelas VI

Adapun ketunaan yang dialami adalah lamban belajar dan berkesulitan belajar. Dari 12 siswa ini, sebelas anak mengalami lamban belajar, sedangkan satu anak berkesulitan belajar yaitu Angga Tri Prayuda yang duduk di kelas IV. Anak-anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu dan berdomisili di dusun yang jauh dari lingkungan sekolah. Sebagian besar mereka tinggal bersama neneknya, karena orang tua mereka merantau di luar kota.

Data layanan yang dibutuhkan anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus ini sangat membutuhkan layanan pendidikan. Layanan yang mereka butuhkan adalah pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan budi pekerti dan pendidikan karakter dan juga pendidikan keterampilan. Mereka butuh semua itu demi bekalnya di masa depan untuk kelangsungan hidupnya.

Data layanan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus. SDN Sekar II sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memberikan layanan yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Layanan yang diberikan sekolah adalah pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan budi pekerti dan pendidikan karakter.

Anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Sdn Sekar II diberikan pendidikan yang sama seperti anak-anak normal lainnya. Mereka memperoleh pembelajaran yang sama dalam satu kelas, belajar bersama dan berkarya bersama-sama. Mereka mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal apapun. Bahkan dalam hal pembimbingan materi mereka mendapatkan perlakuan yang lebih, karena memang mereka membutuhkan hal ini. Kalau tidak dibimbing secara individu mereka akan sangat ketinggalan dengan teman-temannya. Namun demikian walaupun sudah dibimbing secara individu, namanya anak berkebutuhan khusus dalam mengerjakan soal-soal ulangan nilainya ya masih saja berada di bawah nilai teman-teman yang normal. Tetapi apapun yang terjadi mereka tetap kita hargai, kita beri semangat, motivasi dan sanjungan agar mereka senang dan merasa bangga diperhatikan. Kalau soal-soal ulangan harian untuk anak berkebutuhan khusus dibedakan dengan anak-anak normal, karena soal-soal ulangan harian yang membuat guru kelas masing-masing. Namun kalau ulangan tengah semester dan ulangan semester, soal-soal ulangannya sama seperti anak-anak normal, karena yang membuat soal Dinas Pendidikan Kabupaten. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten, untuk anak-anak berkebutuhan khusus tidak dituntut nilai sesuai dengan KKM, yang penting anak mau bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya di sekolah dan teman-temannya mau menerima mereka menjadi teman bermain dan belajar, mau mengakui kekurangan dan keterbatasan dari anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak normal tidak mengucilkan mereka anak-anak berkebutuhan khusus

Pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran sebagai implementasi dari layanan pendidikan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus. Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka dilaksanakan pengamatan langsung terhadap enam orang guru kelas dan dua orang guru mata pelajaran yaitu guru pendidikan jasmani dan guru pendidikan agama dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hasil dari pengamatan ini adalah : bahwa guru-guru di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan telah memberikan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus dengan tanpa ada pengecualian. Semua siswa baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus semua diperlakukan sama dan mereka memperoleh hak yang sama dalam proses pembelajaran. Guru-guru tidak bersikap diskriminatif. Hasil observasi dapat dilihat di lampiran. Guru-guru menyadari dan menerima kekurangan dan keterbatasan dari anak-anak berkebutuhan khusus ini. Dengan adanya kekurangan dan keterbatasan dari mereka anak-anak berkebutuhan khusus ini para guru menjadi tertantang untuk mendalami karakter mereka, sehingga mereka berusaha untuk meningkatkan kompetensinya tentang pendidikan inklusif.

Identifikasi Faktor-aktor penyebab kurang optimalnya layanan pendidikan. Layanan yang diberikan Sekolah Dasar Negeri Sekar II terhadap anak berkebutuhan khusus kurang optimal, disebabkan karena adanya beberapa faktor di antaranya :

(1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusif.

Hal ini bisa dibuktikan dengan masih adanya anak berkebutuhan khusus di sekitar SDN Sekar II yang tidak sekolah. Pengetahuan masyarakat tentang pendidikan inklusif masih sangat terbatas. Mereka belum paham tentang pendidikan inklusif. Mereka belum bisa mengerti bahwa sekolah reguler bisa menerima dan memberikan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus.

(2) Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru tentang pendidikan inklusif. Pengetahuan dan keterampilan guru-guru di SDN Sekar II tentang pendidikan dan pembelajaran di sekolah inklusif sangatlah terbatas, dikarenakan latar belakang pendidikan mereka bukan dari pendidikan luar biasa, namun dari pendidikan guru umum. Sebagian dari mereka ada yang sudah pernah mendapatkan pendidikan tentang pendidikan inklusif, namun baru sebatas sosialisasi saja, sehingga mereka belum begitu menguasai tentang penerapan metodologi pembelajaran yang bervariasi. Namun demikian mereka tidaklah putus asa, mereka terus belajar dan belajar untuk meningkatkan kompetensinya, baik melalui workshop, seminar, diklat dan KKG pendidikan inklusif.

(3) Kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus selain memiliki kekurangan, mereka juga memiliki kelebihan. Mereka memang lemah di faktor daya pikir, namun di sisi lain mereka menonjol. Ada yang menonjol di bidang Olah Raga, ada yang menonjol di bidang keterampilan dan kerajinan,

ada yang menonjol di bidang agama dan ada pula yang menonjol di bidang seni. Semua itu membutuhkan fasilitas guna mengembangkan potensi yang ada pada mereka. Namun sampai sejauh ini sekolah belum mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mereka butuhkan. Sekolah belum memiliki lapangan sepak bola, belum memiliki lapangan tenis meja, belum memiliki lapangan bulu tangkis untuk menyalurkan bakat mereka di bidang Olah Raga. Sekolah belum memiliki alat-alat pertukangan dan kerajinan yang dapat untuk mengembangkan bakat dan keterampilan mereka. Anak berkebutuhan khusus di SDN Sekar II sudah ada yang pandai membuat kerajinan dari batu akik, ada yang sudah bisa membuat kerajinan peralatan rumah tangga, irus, dingklik dan sapu. Namun sekolah belum mampu membelikan mesin untuk pembuatan kerajinan batu akik, dan mesin penghalus papan. Mereka mengerjakan ini semua dengan alat seadanya.

(4) Masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus harus bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Anak-anak berkebutuhan khusus ini di lingkungannya masih terisih dan terisolasi. Sebagian dari masyarakat belum bisa menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus. Bahkan ada orang tua yang melarang anaknya untuk bergaul dan berteman dengan anak berkebutuhan khusus alasannya takut ketularan. Apalagi sampai belajar bersama mereka melarang keras. Mereka beranggapan bahwa tempat yang tepat untuk bersekolah bagi anak berkebutuhan khusus itu di Sekolah Luar Biasa (SLB), bukan di sekolah reguler. Mereka juga beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus ini bisa mengganggu

belajarnya anak-anak yang normal. Bahkan ada yang beranggapan bahwa keberadaan anak berkebutuhan khusus ini akan menjatuhkan popularitas sekolah dan juga merusak prestasi sekolah, hasil ulangan ataupun ujian nilainya kurang bagus. Hal inilah yang bisa membuat anak-anak berkebutuhan khusus minder dan merasa tersisih, sehingga bisa membuat kemajuan mereka tersendat. Kesulitan untuk maju bagi anak berkebutuhan khusus kadang terhalang, bukan karena kecerdasan otaknya yang lamban, namun kadang dari faktor penerimaan masyarakat. Masyarakat yang sulit menerima kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka tetap beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus itu harus menyendiri dan tidak boleh bersosialisasi dengan anak-anak normal sebayanya.

Upaya yang dilakukan Sekolah Dasar Negeri Sekar II, untuk meningkatkan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Sekolah Dasar Negeri Sekar II berupaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus dengan menempuh berbagai jalan di antaranya :

- (1) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan inklusif.
- (2) Mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk pengadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK).
- (3) Memfasilitasi guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus.
- (5) Penjelasan kepada masyarakat tentang persamaan hak untuk memperoleh pendidikan.

B. Pembahasan.

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua. Pendidikan inklusif bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan melainkan implementasi filosofi yang mengakui kebhinekaan antar manusia yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Difabel hanyalah suatu bentuk kebhinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya dan agama. Di dalam individu berkelainan pastilah ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam setiap individu terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk yang sempurna. Hal ini diwujudkan dalam sistem pendidikan inklusif yang memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang mendorong sikap yang penuh toleransi dan menghargai.

Pendidikan inklusif di SD belum beriringan dengan visi pendidikan belum berdasarkan inklusif ethos yang mengedepankan keragaman dan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Kurikulum dan metode

pengajaran yang kaku dan sulit diakses oleh ABK masih ditemukan pada kelas inklusif. Pengintegrasian kurikulum belum dapat dilakukan oleh guru-guru karena kemampuan guru yang terbatas. Guru-guru belum mendapatkan training yang praktikal dan kebanyakan yang diberikan sifatnya sosialisasi saja.

Sekolah Dasar Negeri Sekar II, menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2014. Tahun ini memiliki siswa berkebutuhan khusus sejumlah 12 siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Dari 12 siswa ini meliputi : Kelas I ada dua siswa , laki-laki semua, kelas II ada dua siswa perempuan semua, kelas II ada satu siswa laki-laki, kelas IV ada satu siswa laki-laki, kelas V ada dua siswa , laki-laki satu dan perempuan satu dan kelas VI ada empat siswa laki-laki semua. Adapun ketunaan yang dialami mereka adalah lamban belajar dan berkesulitan belajar. Dari 12 siswa ini sebelas siswa mengalami lamban belajar dan satu siswa berkesulitan belajar. Adapun nama-nama siswa berkebutuhan khusus SDN Sekar II adalah sebagai berikut :

1. Agta Favian Ramadhana kelas I
2. Rio Saputra kelas I.
3. Defita Purnama Sari kelas II
4. Nova Anggraini kelas II
5. Arival Maulana kelas III
6. Angga Tri Prayuda kelas IV
7. Dwi Nur Lisa Ramadhani kelas V

8. Panji Wahyu Saputra kelas V
9. Alex Dinda Remaja kelas VI
10. Iis Rio Hartanto kelas VI
11. Eko Wahyudi kelas VI
12. Farid Putra Safarudin kelas VI

Anak-anak berkebutuhan khusus ini sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka kebanyakan tinggal bersama neneknya, karena orang tuanya merantau di luar kota. Mereka berdomisili cukup jauh dengan sekolah. Pulang dan pergi sekolah mereka jalan kaki dengan jarak tempuh lumayan jauh, ada yang satu kilo meter ke sekolah, ada yang dua kilo meter, bahkan ada yang jarak rumah ke sekolah tiga kilo meter, dengan medan yang cukup sulit, naik turun bukit dan jalan setapak. Dengan kondisi geografis yang demikian sulit dan juga kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan inilah para orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke Sekolah Luar Biasa (SLB) yang keberadaannya di kota kabupaten. Mereka menitipkan anak-anaknya di SDN Sekar II. Beruntunglah bagi mereka karena sekarang SDN Sekar II telah menyelenggarakan pendidikan inklusif yang dapat menampung semua siswa dalam kondisi apapun. Sekolah melayani mereka anak-anak berkebutuhan khusus sama seperti anak-anak pada umumnya tanpa membedakan dan tidak diskriminatif. Mereka anak-anak berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan yang sama seperti anak-anak normal lainnya.

Pada umumnya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kurang tahu akan kebutuhannya sendiri. Karena itu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sangat membutuhkan bantuan orang lain, baik di segi fisik maupun psikis. Oleh sebab itu Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan sebagai sekolah inklusif telah memberikan fasilitas pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan para guru berusaha memberikan layanan pendidikan sepenuhnya terhadap Anak-Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sesuai dengan kebutuhannya menurut kemampuan dan ilmu yang dimilikinya. Contoh layanan fisik: Ada sebagian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak tahu di mana dia harus buang air kecil ataupun air besar, lalu apa yang harus dia lakukan setelah buang air kecil ataupun air besar. Oleh karena itu, ini semua menjadi tanggung jawab para guru, mulai dari membawanya ke wc, melepas pakaiannya, menyiram kotorannya, sampai pada membersihkan atau mencebokinya.

Bagaimana dengan layanan psikis? Layanan psikis diberikan para guru dengan cara pembiasaan. Contoh: Bagaimana cara duduk yang sopan, berbicara dengan bapak ibu guru, cara makan dan minum yang sopan, dan sebagainya adab berbicara dan adap perilaku selalu ditanamkan melalui pembiasaan sebagai implementasi pendidikan budi pekerti dan pendidikan karakter. Untuk melatih otak agar berpikir jernih dengan mengerjakan soal-soal. Para guru di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan memiliki tugas ganda, yaitu selain mengajar, membimbing, dan mendidik siswa yang non Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), mereka

juga harus memberikan layanan khusus pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yang sesuai dengan kebutuhannya yang semua ini membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa.

Sekolah Dasar Negeri Sekar II, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas terdekat juga memberikan layanan kesehatan yang sama kepada Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Baik dalam hal imunisasi, skrining, maupun pemeriksaan kesehatan lainnya. Di sini tidak ada diskriminasi terhadap Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Dalam hal Pendidikan Karakter dan Pendidikan Budi Pekerti, Sekolah Dasar Negeri Sekar II, menerapkan Sabtu Santun yang berlaku bagi semua warga sekolah termasuk Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tanpa kecuali. Di setiap hari Sabtu semua warga sekolah menggunakan bahasa pengantar bahasa Jawa. Hal ini dikandung maksud agar anak-anak masih mengenali Jawanya, tidak kehilangan Jawanya, atau dalam bahasa Jawanya disebutkan Wong Jowo ora ilang Jawane. Demikian juga Anak-Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sini walau mereka memiliki sedikit kekurangan di daya pikirnya, namun dalam hal perilaku dan bicara diharapkan santun, sehingga bisa tercipta insan yang mulia akhlaknya.

Di era sekarang sudah banyak siswa Jawa yang tidak Jawa lagi. Mereka seperti tidak kenal dengan bahasa Jawa, dan mungkin bisa disebut wis ilang Jawane. Juga dalam hal sopan santun, sudah banyak berkurang. Oleh sebab itu Sekolah Dasar Negeri Sekar II, memberikan Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Budi Pekerti kepada seluruh siswa, termasuk Anak – Anak

Berkebutuhan Khusus (ABK), agar menjadi anak – anak yang sholeh dan sholeha.

Di samping memiliki kekurangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), juga memiliki kelebihan. Oleh karena itu sekolah inklusif selalu menghargai kelebihan para Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dan Bapak Ibu guru selalu memotivasi dan berusaha untuk mengembangkan bakat yang dimiliki para Anak Berkebutuhan husus (ABK) agar kelebihan yang mereka miliki dapat tersalurkan dan dapat bermanfaat di masa mendatang. Tidak sedikit Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang sukses dalam hidupnya.

Untuk menyalurkan bakat dan keahlian yang dimiliki anak- anak, termasuk Anak–Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), sekolah memfasilitasi mereka dengan mengadakan les di luar jam pelajaran dan juga ekstra kurikuler. Mereka bisa memilih ekstra yang disukai, sehingga bakat dan keahlian mereka dapat tersalurkan.

Untuk Anak–anak Berkebutuhan Khusus (ABK), kekurangan bukanlah suatu penghalang untuk mencapai keberhasilan. Banyak sekali orang-orang yang memiliki anggota tubuh yang sempurna, otak yang cerdas, mereka kalah sukses dibandingkan dengan yang kurang sempurna anggota tubuhnya ataupun psikisnya. Bahkan tidak sedikit Anak–Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang sukses dalam hidupnya.

Sekolah Dasar Negeri Sekar II sebagai sekolah inklusif telah memberikan layanan pendidikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang ada di sekolah tersebut sesuai dengan kebutuhan dari masing–masing

siswa yang termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tanpa adanya perbedaan. Layanan yang diberikan adalah : Pendidikan jasmani dan rohani, Pendidikan ketrampilan, Pendidikan Budi Pekerti, dan Pendidikan Karakter juga layanan kesehatan.

Namun layanan tersebut belum bisa terpenuhi secara optimal, dikarenakan berbagai faktor yang menjadi kendalanya. Faktor – faktor tersebut datang dari dalam dan juga dari luar. Faktor–faktor penyebab kurang optimalnya layanan pendidikan antara lain :

(1) Faktor internal. Banyak hal yang menjadi kendala untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang datang dari dalam, antara lain:

(a) Tidak adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK). Di Kabupaten Pacitan, untuk guru pembimbing khusus sangat minim. Jangankan untuk sekolah inklusif, untuk sekolah luar biasapun masih kurang. Hal ini menyulitkan bagi sekolah inklusif untuk memperoleh guru pembimbing khusus. SDN Sekar II sudah berusaha mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk pengadaan guru pembimbing khusus ini.

(b) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru tentang pendidikan inklusif. Pengetahuan dan keterampilan guru-guru di SDN Sekar II tentang pendidikan dan pembelajaran di sekolah inklusif sangatlah terbatas, dikarenakan latar belakang pendidikan mereka bukan dari pendidikan luar biasa, namun dari pendidikan guru umum. Sebagian dari mereka ada yang sudah pernah mendapatkan pendidikan tentang pendidikan inklusif, namun

baru sebatas sosialisasi saja, sehingga mereka belum begitu menguasai tentang penerapan metodologi pembelajaran yang bervariasi. Namun demikian mereka tidaklah putus asa, mereka terus belajar dan belajar untuk meningkatkan kompetensinya, baik melalui workshop, seminar, diklat dan KKG pendidikan inklusif.

(c) Tidak adanya sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus selain memiliki kekurangan, mereka juga memiliki kelebihan. Mereka memang lemah di faktor daya pikir, namun di sisi lain mereka menonjol. Ada yang menonjol di bidang Olah Raga, ada yang menonjol di bidang keterampilan dan kerajinan, ada yang menonjol di bidang agama dan ada pula yang menonjol di bidang seni. Semua itu membutuhkan fasilitas guna mengembangkan potensi yang ada pada mereka. Namun sampai sejauh ini sekolah belum mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mereka butuhkan. Sekolah belum memiliki lapangan sepak bola, belum memiliki lapangan tenis meja, belum memiliki lapangan bulu tangkis untuk menyalurkan bakat mereka di bidang Olah Raga. Sekolah belum memiliki alat-alat pertukangan dan kerajinan yang dapat untuk mengembangkan bakat dan keterampilan mereka. Anak berkebutuhan khusus di SDN Sekar II sudah ada yang pandai membuat kerajinan dari batu akik, ada yang sudah bisa membuat kerajinan peralatan rumah tangga, irus, dingklik dan sapu. Namun sekolah belum mampu membelikan mesin untuk pembuatan kerajinan batu akik, dan mesin penghalus papan. Mereka mengerjakan ini semua dengan alat seadanya.

(d) Guru kesulitan dalam menerapkan metodologi pembelajaran bervariasi. Di dalam sekolah inklusif sangat dibutuhkan metodologi pembelajaran yang pas dan sesuai dengan keberadaan siswa yang memiliki karakter yang heterogen. Di sinilah diterapkan metodologi pembelajaran bervariasi. Guru-guru menjadi tertantang untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menerapkan metodologi pembelajaran bervariasi ini agar mereka tidak mengalami kesulitan menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ini.

(e) Penerimaan dan perlakuan siswa normal terhadap siswa berkebutuhan khusus yang kurang bagus. Sebagian siswa masih ada yang belum bisa menerima kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus di tengah-tengah mereka. Mereka menganggap anak-anak berkebutuhan khusus ini berbeda dengan mereka yang normal maka harus menyendiri dan tidak berkumpul dengan mereka anak-anak yang normal.

(f) Tidak adanya dana untuk anak berkebutuhan khusus. SDN Sekar II sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sejak tahun 2014, sampai sekarang belum pernah mendapatkan bantuan dana khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Segala pendanaan melekat pada dana operasional sekolah. Sekolah mengalami kesulitan untuk menggali dana buat anak berkebutuhan khusus.

(2) Faktor Eksternal . Hambatan untuk meningkatkan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus, selain datang dari dalam sekolah juga datang dari luar sekolah di antaranya:

(a) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusif. Pengetahuan masyarakat tentang pendidikan inklusif masih sangat terbatas. Mereka belum paham tentang pendidikan inklusif. Mereka belum bisa mengerti bahwa sekolah reguler bisa menerima dan memberikan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Sebagian besar komite belum berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, karena mereka memang belum paham benar tentang pendidikan inklusif. Yang mereka tahu bahwa anak berkebutuhan khusus tidak bisa sekolah di sekolah reguler.

(b) Masih adanya anggapan bahwa anak berkebutuhan khusus harus bersekolah di Sekolah Luar Biasa. Sebagian besar masyarakat belum paham bahwa anak berkebutuhan khusus itu bisa diterima di sekolah reguler, mereka juga tidak tahu kalau SDN Sekar II sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Bahkan mereka beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus tidak boleh bermain dan belajar dengan anak-anak normal sebayanya.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut serta untuk meningkatkan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus, maka sekolah menempuh berbagai cara yaitu :

(1) Mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Namun sampai saat ini usulan tersebut belum direalisasi, dikarenakan di Kabupaten Pacitan untuk guru pembimbing khusus masih kurang. Untuk sekolah-sekolah luar biasa saja masih belum mencukupi, apalagi untuk sekolah inklusif tidak tersedia. Oleh

karena itu sampai saat ini layanan pendidikan yang diberikan SDN Sekar II terhadap anak berkebutuhan khusus dirasa masih kurang optimal.

(2) Memfasilitasi guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui diklat, workshop, seminar dan sosialisasi tentang pendidikan inklusif, baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten. Di SDN Sekar II, Kepala Sekolah dan lima orang guru sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang pendidikan inklusif. Namun ilmu yang didapat masih belum cukup untuk meningkatkan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus di SDN Sekar II. Oleh sebab itu layanan pendidikan yang diberikan SDN Sekar II terhadap siswa berkebutuhan khusus kurang optimal.

(3) Berupaya untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus. Sekolah Dasar Negeri Sekar II, belum memiliki lapangan sepak bola, belum memiliki lapangan tenis meja, belum memiliki lapangan bulu tangkis untuk menyalurkan bakat mereka di bidang Olah Raga. Selain itu sekolah juga belum memiliki alat-alat pertukangan dan kerajinan yang dapat untuk mengembangkan bakat dan keterampilan mereka. Anak berkebutuhan khusus di SDN Sekar II sudah ada yang pandai membuat kerajinan dari batu akik, ada yang sudah bisa membuat kerajinan peralatan rumah tangga, irus, dinklik dan sapu. Namun sekolah belum mampu membelikan mesin untuk pembuatan kerajinan batu akik, dan mesin penghalus papan. Mereka mengerjakan ini semua dengan alat seadanya, sehingga belum dapat meningkatkan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara optimal.

(4) Penerapan metodologi pembelajaran yang bervariasi, baik rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran maupun teknik penilaiannya. Dengan metode yang bervariasi ini, sangat menyulitkan para guru. Sehingga para guru tertantang untuk meningkatkan kompetensinya tentang pendidikan inklusif, agar mereka tidak lagi merasa kesulitan menghadapi anak berkebutuhan khusus yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun ilmu yang mereka peroleh belum begitu mendalam, sehingga belum bisa membantu sekolah untuk memberikan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus secara optimal.

(5) Penghapusan diskriminatif. SDN Sekar II sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, tidak diskriminatif. Semua siswa diperlakukan sama, tidak ada perbedaan antara yang anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Mereka semua memperoleh layanan pendidikan tanpa kecuali. Anak-anak normal diberi pengertian untuk mengakui kelemahan dan kekurangan dari anak berkebutuhan khusus, dan juga diharapkan mau menerima mereka sebagai teman, seperti halnya teman – teman yang lain. Dengan demikian mereka dapat bersosialisasi, bermain dan belajar bersama-sama, saling menghargai sehingga terjalin kebersamaan dan persaudaraan yang erat. Namun masih ada juga anak yang kurang bisa menerima temannya yang berkebutuhan khusus. Mereka menjahui anak yang berkebutuhan khusus, sehingga hal ini menyebabkan layanan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus belum bisa optimal.

(6) Penggalan dana untuk anak berkebutuhan khusus. Dana dari pemerintah yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus tidak ada. Dana itu melekat pada dana Bantuan Operasional Sekolah, sehingga sekolah kesulitan untuk menggali dana buat anak berkebutuhan khusus. Satu-satunya cara untuk menggali dana tersebut dengan cara minta sumbangan kepada wali murid secara suka rela. Besaran sumbangan tidak ditentukan, namun sesuai dengan kerelaan dari mereka. Hal ini menyebabkan sekolah belum bisa memberikan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus meningkat dan optimal.

Walaupun banyak kendala, hambatan maupun ancaman tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ada di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, namun sekolah berupaya mencari solusi untuk mengatasi semua itu, sehingga kendala tersebut dapat teratasi dan SDN Sekar II tetap dapat melaksanakan pendidikan inklusif dan memberikan layanan pendidikan terhadap ABK, tanpa adanya perbedaan, walaupun belum optimal. Harapan dari sekolah, untuk para orang tua dari mereka Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bisa merasa senang dan puas dengan layanan yang diberikan oleh sekolah terhadap anak-anak mereka, walaupun belum optimal.

Untuk mengetahui sejauh mana layanan yang diberikan sekolah kepada anak berkebutuhan khusus, diadakan wawancara dengan 12 siswa berkebutuhan khusus, dan juga observasi kepada 6 guru kelas dan 2 orang guru mata pelajaran. Hasil wawancara dengan Alex Dinda Remaja, bahwa

anak tersebut mendapatkan layanan pendidikan rohani, melalui pendidikan agama. Iis Rio Hartanto dari hasil wawancaranya dapat dicermati bahwa anak tersebut mendapatkan layanan dalam pendidikan budi pekerti. Hasil wawancara dengan EkoWahyudi dapat disimpulkan bahwa anak tersebut mendapatkan layanan pendidikan jasmani melalui pendidikan keterampilan. Farid Putra Safarudin, dalam wawancaranya jelas anak tersebut mendapatkan layanan pendidikan rohani. Dari hasil wawancaranya Panji Wahyu Saputra dapat ditarik kesimpulan bahwa anak tersebut mendapat layanan pendidikan jasmani. Dwi Nur Lisa Ramadhani dari wawancaranya anak tersebut telah mendapatkan layanan pendidikan budi pekerti dan pendidikan karakter. Angga Tri Prayuda dari hasil wawancaranya dia telah mendapatkan layanan pendidikan rohani. Dari hasil wawancaranya Arival Maulana Hardianyah sudah mendapatkan layanan pendidikan budi pekerti. Nova Anggraini dari hasil wawancaranya dia telah mendapatkan pendidikan rohani. Dari hasil wawancaranya Defita Purnama Sari telah mendapat pendidikan budi pekerti dan pendidikan karakter. Rio Saputra berdasarkan hasil wawancaranya anak tersebut sudah mendapatkan layanan pendidikan rohani. Agta Favian Ramadhani melihat hasil wawancaranya anak tersebut telah mendapatkan layanan pendidikan jasmani. Dari hasil wawancara dari 12 siswa berkebutuhan khusus ini kita dapat mengamati bahwa mereka semua telah mendapatkan layanan pendidikan yang diberikan oleh Sekolah Dasar Negeri Sekar II.

Untuk hasil wawancara dari guru semua menyebutkan mengalami kesulitan menghadapi anak berkebutuhan khusus, karena memang pendidikan para guru SDN Sekar II bukan dari pendidikan guru luar biasa, namun dari pendidikan guru umum.

Kalau hasil observasi, semua guru telah memberikan layanan pendidikan yang sama, baik terhadap anak berkebutuhan khusus maupun anak normal. Mereka tidak membeda-bedakan dan mereka tidak diskriminatif.

Untuk ke depannya mudah-mudahan Sekolah Dasar Negeri Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan sebagai sekolah inklusif dapat memberikan layanan pendidikan yang jauh lebih baik dari sekarang. Begitu juga Anak-Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang ada di wilayah kecamatan Donorojo dan sekitarnya, dapat menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negeri Sekar II, tidak perlu bersekolah ke lain daerah yang jauh tentunya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

Sekolah Dasar Negeri Sekar II sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif telah memberikan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada perbedaan. Namun layanan yang diberikan belum optimal, disebabkan banyak faktor yang menjadi penyebab kurang optimalnya layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus yaitu:

(1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusif. Sebagian masyarakat masih belum paham benar terhadap pendidikan inklusif. Mereka masih beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus tidak boleh bermain dengan anak normal. Apalagi sampai belajar bersama mereka melarangnya, karena mereka menganggap anak berkebutuhan khusus hanya akan mengganggu anak-anak normal.

2) Tidak adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK). Sekolah sudah berusaha untuk mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk pengadaan guru pembimbing khusus, namun sampai saat ini belum terealisasi, dikarenakan di Kabupaten Pacitan untuk guru pembimbing khusus masih minim. Di sekolah-sekolah luar biasa saja masih sangat kekurangan, sehingga untuk sekolah inklusif tidak bisa memberi.

3) Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan guru tentang pendidikan inklusif. Pengetahuan dan keterampilan para guru di SDN Sekar II tentang pendidikan inklusif masih sangat terbatas, dikarenakan latar belakang pendidikan mereka bukan dari pendidikan luar biasa tetapi dari pendidikan guru umum. Guru-guru ini mendapatkan pendidikan inklusif baru sebatas sosialisasi dan diklat yang waktunya sangat singkat. Pengetahuan tentang pendidikan inklusif yang mereka peroleh masih sangat minim, sehingga mereka benar-benar belum mendalam.

4) Tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus. Masih banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus untuk menyalurkan bakatnya maupun untuk meningkatkan potensinya. Namun SDN Sekar II belum bisa memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan. Sekolah akan berupaya untuk pengadaan lapangan tenis meja, pembuatan lapangan badminton untuk berlatih bagi anak berkebutuhan khusus yang hoby di bidang itu. Sekolah juga akan berupaya untuk pengadaan mesin pertukangan dan mesin kerajinan batu akik, sehingga anak-anak yang punya keterampilan di bidang itu bisa menggunakannya.

5) Masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus sekolahnya di Sekolah luar biasa (SLB). Sebagian masyarakat menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus tidak boleh sekolah di sekolah reguler, karena mereka menganggap sekolah reguler bukan tempat sekolah bagi anak berkebutuhan khusus.

Upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus adalah:

1) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan inklusif. Di setiap awal tahun ajaran baru dan di saat akhir semester sekolah mengumpulkan wali murid. Di saat inilah diadakan sosialisasi tentang pendidikan inklusif. SDN Sekar II menerima dan memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. bagi bapak ibu yang memiliki anak yang termasuk berkelainan dapat menyekolahkanya di sini. SDN Sekar II telah menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang diselenggarakan untuk semua anak, baik yang berkelainan maupun anak yang normal tanpa ada perbedaan. Mereka mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

2) Pengadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK). SDN Sekar II sudah mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk pengadaan guru pembimbing khusus. Namun sampai saat ini belum terealisasi, dikarenakan di kabupaten Pacitan untuk guru pembimbing khusus masih sangat minim. Di sekolah-sekolah luar biasa saja masih kurang, sehingga untuk sekolah inklusif tidak bisa menyediakan.

3) Memfasilitasi guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui workshop, diklat, seminar dan KKG tentang pendidikan inklusif. Dikarenakan pengetahuan dan keterampilan guru-guru tentang pendidikan inklusif ini masih sangat terbatas, maka sekolah memberikan fasilitas kepada guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya, melalui diklat,

workshop, seminar, sosialisasi dan KKG, baik yang diselenggarakan di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten.

4) Pengadaan sarana prasarana untuk anak berkebutuhan khusus. Saat ini SDN Sekar II, berupaya untuk pengadaan sarana dan prasarana di bidang olah raga dan kerajinan., yaitu pengadaan mesin pertukangan, mesin kerajinan batu akik, lapangan tenis meja, pembuatan lapangan bulu tangkis peralatan musik. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat menyalurkan keterampilan dan potensi yang dimilikinya.

5) Memberi penjelasan kepada masyarakat tentang persamaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Semua peserta didik, baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa kecuali. Anak berkelainan bisa bersekolah di sekolah reguler. Mereka tidak harus bersekolah ke sekolah luar biasa yang berada di kota kabupaten, yang jauh dari tempat tinggalnya. Mereka bisa bersekolah di sekolah reguler terdekat yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kalau di sisi ya di SDN Sekar II, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ada beberapa saran yang perlu disampaikan yaitu:

Sekolah Dasar Negeri Sekar II sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, agar:

- 1) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan inklusif di setiap awal tahun peajaran, agar para orang tua siswa paham tentang pendidikan inklusif. Sehingga mereka bisa menerima kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus di tengah-tengah anak-anak normal. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak merasa tersisihkan. Mereka bisa bermain dan bersama di tengah keaneka ragaman.
- 2) Mengupayakan adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK). Sekolah harus terus berupaya untuk mendapatkan guru pembimbing khusus, agar sekolah dapat meningkatkan layanan pendidikan lebih optimal.
- 3) Memfasilitasi para guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui: pendidikan dan Pelatihan, workshop, seminar dan KKG tentang pendidikan inklusif, agar para guru memperoleh pengetahuan tentang pendidikan inklusif lebih dalam lagi. Sehingga mereka para guru tidak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus .
- 4) Mengupayakan pengadaan saran dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan dan bakat anak berkebutuhan khusus, misalnya; alat pertukangan dan kerajinan bagi anak berkebutuhan khusus yang terampil di bidang

pertukangan dan kerajinan, alat musik untuk menyalurkan bakat siswa berkebutuhan khusus di bidang seni musik, lapangan tenis meja, dan lapangan bulu tangkis untuk menyalurkan bakat anak berkebutuhan khusus di bidang olah raga.

- 5) Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang persamaan hak dalam memperoleh pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Semua anak baik yang berkebutuhan khusus maupun anak yang normal, mereka mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Jadi tidak ada perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam hal memperoleh pendidikan. Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya.

STIE Widya Wivaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

Degeng Nyoman S 2014 : “Orkestra Pembelajaran Pada Sekolah Inklusif”. Dalam Rapat Sinkronisasi dan Fasilitasi Pendidikan Inklusif Propinsi Jawa Timur : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.

Irene Linda 2014 : “Manajemen dan Pengembangan Sekolah Inklusif Kupu-Kupu Dalam Badai”. Dalam Rapat Sinkronisasi dan Fasilitasi Pendidikan Inklusif Propinsi Jawa Timur : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.

Kustawan Dedy 2013. *Manajemen Pendidikan Inklusif* Jakarta: Luxima Metro Media.

Mulyono Aburaman 2003. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Norway Braillo 2007. *TULKIT LIRP Merangkul Perbedaan: Perangkat Untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif, Ramah Terhadap Pembelajaran Jakarta: .IDPN Indonesia*.

Pantjastuti Sri Renani 2009. *Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Praptono Budiyanto 2010. *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Copyright.

Samani Machlas 2015. *Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Sujarwanto 2014: “*Kurikulum bagi Peserta Didik Berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusif*”. Dalam Rapat Sinkronisasi dan Fasilitasi Pendidikan Inklusif Propinsi Jawa Timur: Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.

Widiati Endang 2014: ‘*Arah dan Kebijakan Pendidikan Inklusif*’. Dalam Rapat Sinkronisasi dan Fasilitasi Pendidikan Inklusif Propinsi Jawa Timur: Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.